



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 438
TELP/FAX (0761)855734
PEKANBARU 28282



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen Rencana strategis ini juga telah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Renstra BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keselarasan dengan Rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), evaluasi hasil Renstra BPBD Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan semua pihak yang turut berperan yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam rangka mewujudkan ketangguhan Provinsi Riau dalam menghadapi bencana.

Demikian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran di Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR LAMPIRAN		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
	2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	9
	2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	15
	2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	24
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	34
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	47
	2.1.5. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	48
	2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja	49
	2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Perangkat Daerah	50
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Provinsi Riau	50
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan	50
	2.2.2. Isu Strategis	58
BAB III	TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
	3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029	61
	3.2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029	61
	3.3. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	63
	3.4. Arah Kebijakan	63

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
	4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	66
	4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	77
	4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	93
	4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
BAB V	PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	2.1	Data Rekapitulasi ASN dan PPPTK Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel	2.2	Data ASN dan PPPTK Berdasarkan Jabatan	26
Tabel	2.3	Data ASN dan PPPTK Berdasarkan Golongan	27
Tabel	2.4	Data ASN dan PPPTK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	27
Tabel	2.5	Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBDPK Provinsi Riau	30
Tabel	2.6	Target dan Capaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau	36
Tabel	2.7	Kondisi Titik Api(Hotspot) Karhutla Tahun 2022-2024	37
Tabel	2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBDPK Provinsi Riau	40
Tabel	2.9	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBDPK Provinsi Riau	44
Tabel	2.10	Capaian IKD Tahun 2023 s.d 2024	47
Tabel	2.11	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	51
Tabel	2.12	Analisis SWOT BPBDPK Provinsi Riau	55
Tabel	2.13	Hasil Pembobotan Analisis SWOT BPBDPK	56
Tabel	2.14	Isu Strategis BPBDPK Provinsi Riau	59
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029	61
Tabel	3.2	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	64
Tabel	3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rancangan BPBDPK Provinsi Riau	64
Tabel	4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2026	67
Tabel	4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2026	80
Tabel	4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029	90
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama BPBDPK Provinsi Riau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	93
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci BPBDPK Provinsi Riau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	94

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Keterkaitan Renstra Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja PD	2
Gambar	1.2	Alur Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar	2.1	Peta Wilayah Provinsi Riau	9
Gambar	2.2	Grafik Kecenderungan Bencana di Provinsi Riau	11
Gambar	2.3	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Riau	12
Gambar	2.4	Peta Risiko Gempa Bumi, Karhutla, Kekeringan dan Tanah Longsor di Provinsi Riau	13
Gambar	2.5	Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi, Covid -19 dan Multi Bahaya di Provinsi Riau	14
Gambar	2.6	Struktur Organisasi BPBDPK Provinsi Riau	24
Gambar	2.7	Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar	2.8	Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Jabatan	26
Gambar	2.9	Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Golongan	27
Gambar	2.10	Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Gambar	2.11	Jumlah Personil Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	28

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|----------|--|
| Lampiran | <ol style="list-style-type: none">1. Cascading BPBDPK Provinsi Riau2. Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN 2025-20293. Tujuan dan Sasaran BPBDPK Provinsi Riau4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan5. Rencana Pendanaan6. Sub Kegiatan prioritas7. Indikator Kinerja Daerah8. Indikator Kinerja Utama (IKU)9. Indikator Kinerja Kunci (IKK)10. Format Metatadata IKU dan IKK11. SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah12. SK Tim Satuan Reaksi Cepat13. Laporan Hasil Reviu Inspektorat14. Matriks Verifikasi Penyusunan Renstra BPBDPK Tahun 2025-2029 |
|----------|--|

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

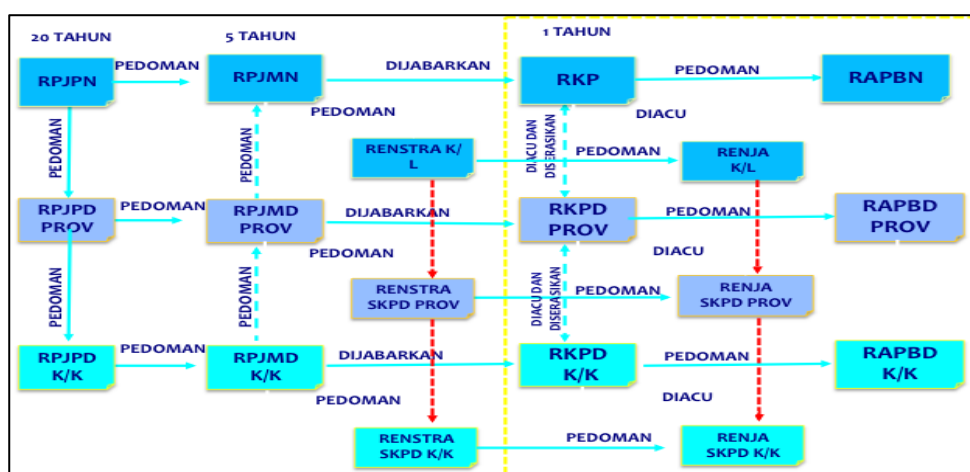
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan dalam pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis adalah penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis perangkat daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana

kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran bermuara pada perubahan nomenklatur daftar kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diagram keterkaitan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



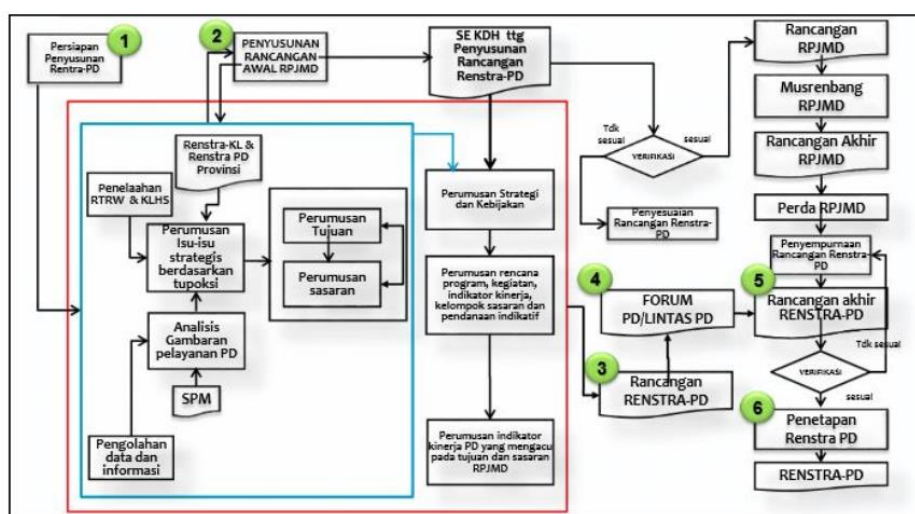
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja PD

Dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) maka terdapat empat tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;

3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan tata cara pengelolaan yang baru. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.2.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.2
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Strategis (Renstra) BPBDPK mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Renstra BPBDPK ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBDPK. Renja BPBDPK merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja BPBDPK yang disusun dengan mengacu pada Renstra BPBDPK dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-BPBDPK. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA perangkat daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan penanggulangan bencana di Provinsi Riau, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis perangkat daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau .

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029;
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029;
4. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029;

6. Merumuskan dan mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029, secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1. BAB I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- 2. BAB II Gambaran Pelayanan , Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi, dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau; Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau; Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau (termasuk capaian SPM); Kelompok sasaran layanan.

- 3. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat Tujuan dan Sasaran Renstra BPBDPK Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah kebijakan BPBDPK dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBDPK Tahun 2025-2029.

- 4. BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBDPK tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBDPK dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- 5. BAB V Penutup**

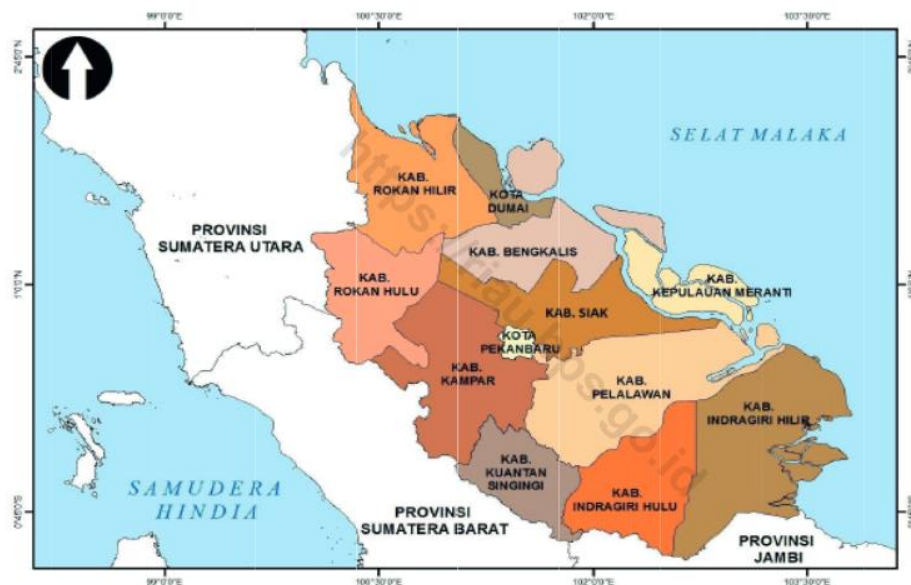
Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki wilayah geografis dengan wilayah daratan seluas kurang lebih 9.002.125 hektar (termasuk pulau-pulau kecil) dan wilayah perairan pesisir seluas kurang lebih 1.262.303 hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak pada antara 01°07'39,37" LS sampai 03°12'42,18" LU atau antara 100°2'58,99" BT sampai 104°0'47,06" BT, dengan jumlah penduduk 6,614.380 jiwa yang tersebar di 10 kabupaten dan 2(dua) kota, dengan 172 kecamatan dan 1609 desa, serta 268 kelurahan. Kesepuluh Kabupaten yang dimaksud adalah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Pelalawan. Dua kota adalah Pekanbaru dan Dumai (RPJMD Provinsi Riau, 2025).



Gambar 2.1
Peta Wilayah Provinsi Riau

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2024 (<https://riau.bps.go.id>)

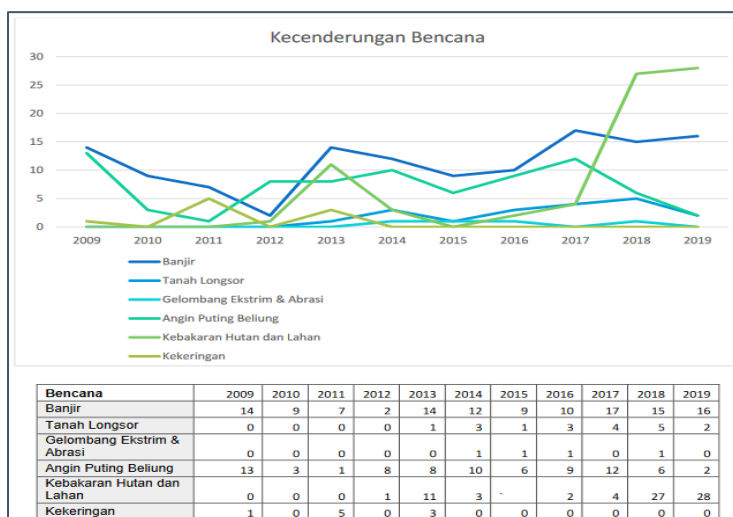
Beragam karakteristik topografi membuat Provinsi Riau semakin rentan terhadap potensi terjadinya bencana alam. Bencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam meliputi bencana akibat

fenomena geologi (gempa bumi, dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non-alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Kejadian bencana di wilayah Provinsi Riau sepanjang tahun 2024, tercatat banjir 752 kejadian, longsor/abrasi 43 kejadian, angin puting beliung 26 kejadian dan titik api (hotspot) sebanyak 2.774 titik dan luas daerah hutan yang terbakar 2504 hektar. Untuk bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sedangkan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (Pusdalops PB–BPBD Provinsi Riau,2025). Meningkatnya frekuensi kejadian bencana setiap tahun, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang.

Nilai Indeks Risiko Bencana di Riau untuk tahun 2024 masih tergolong sedang yaitu 137,69 (BNPB, 2024), ditandai dengan kondisi belum adanya kabupaten/kota dengan kategori IRB rendah, sehingga Riau sebagai wilayah yang rentan bencana. Pemerintah dan berbagai instansi terkait telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana di Riau melalui program mitigasi bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, penting bagi penduduk setempat untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi yang diberikan oleh otoritas terkait dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Riau.

Beragam karakteristik topografi, geologi, iklim, dan hidrologi membuat Provinsi Riau semakin rentan terhadap potensi terjadinya bencana alam. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berdasarkan interpretasi kawasan gempa berdasarkan pendekatan hazard gempa (sejarah bencana gempa atau kejadian gempa wilayah Sumatera), maka Provinsi Riau berada dalam kawasan Zona C dan Zona D atau masih dalam kategori rendah rawan gempa.

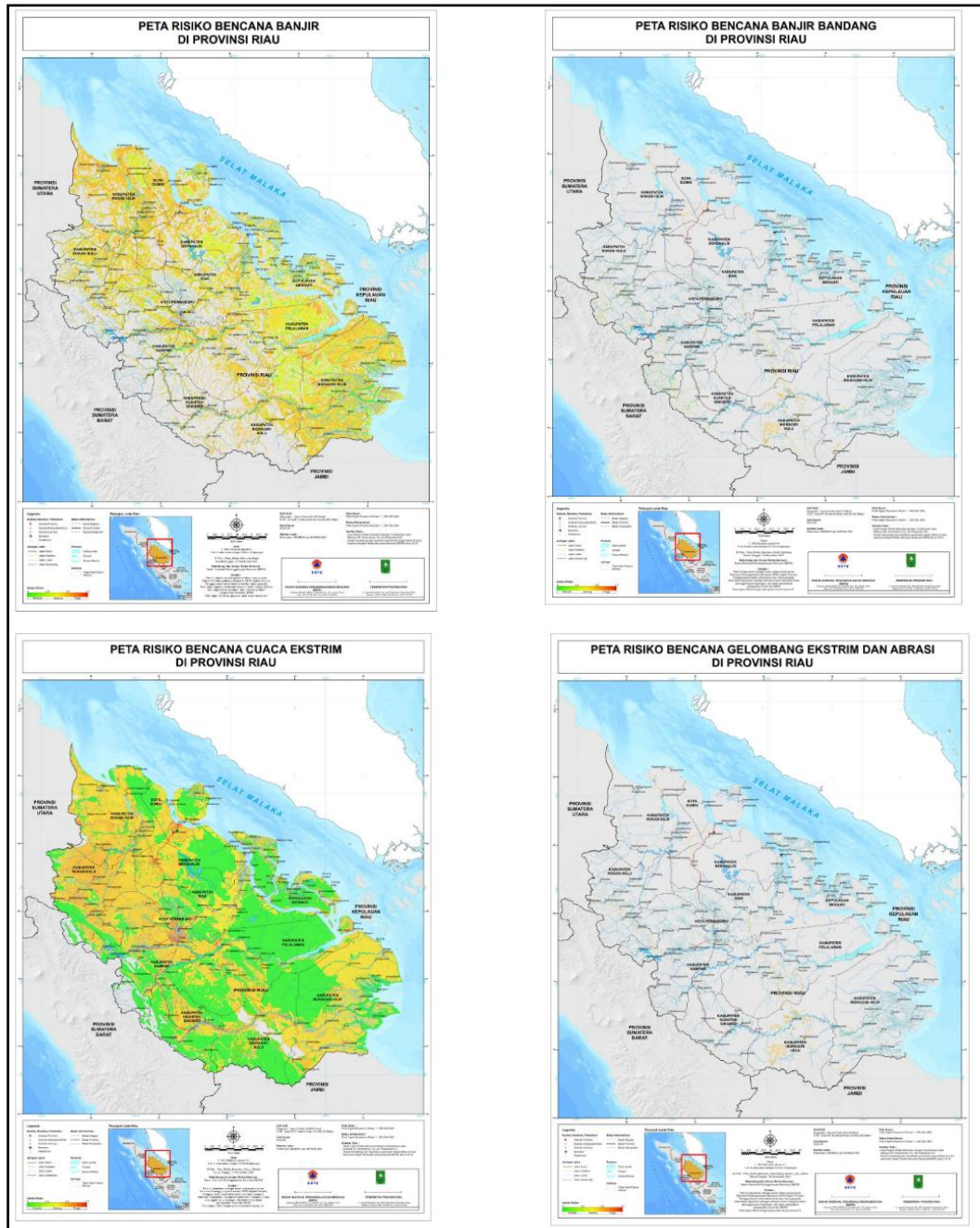
Meningkatnya frekuensi kejadian bencana setiap tahun, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Nilai Indeks Risiko Bencana di Riau masih tergolong sedang yaitu 137,69 (BPBD Provinsi Riau, 2024), ditandai dengan kondisi belum adanya kabupaten/kota dengan kategori IRB rendah, sehingga Riau sebagai wilayah yang rentan bencana. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terdapat 6 (enam) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2009-2019. Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, gelombang ekstim dan abrasi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kejadian bencana yang terjadi menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Adapun kecenderungan bencana yang terjadi di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.2
Grafik Kecenderungan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2009-2019
 Sumber: Dokumen KRB Nasional Provinsi Riau 2022-2026

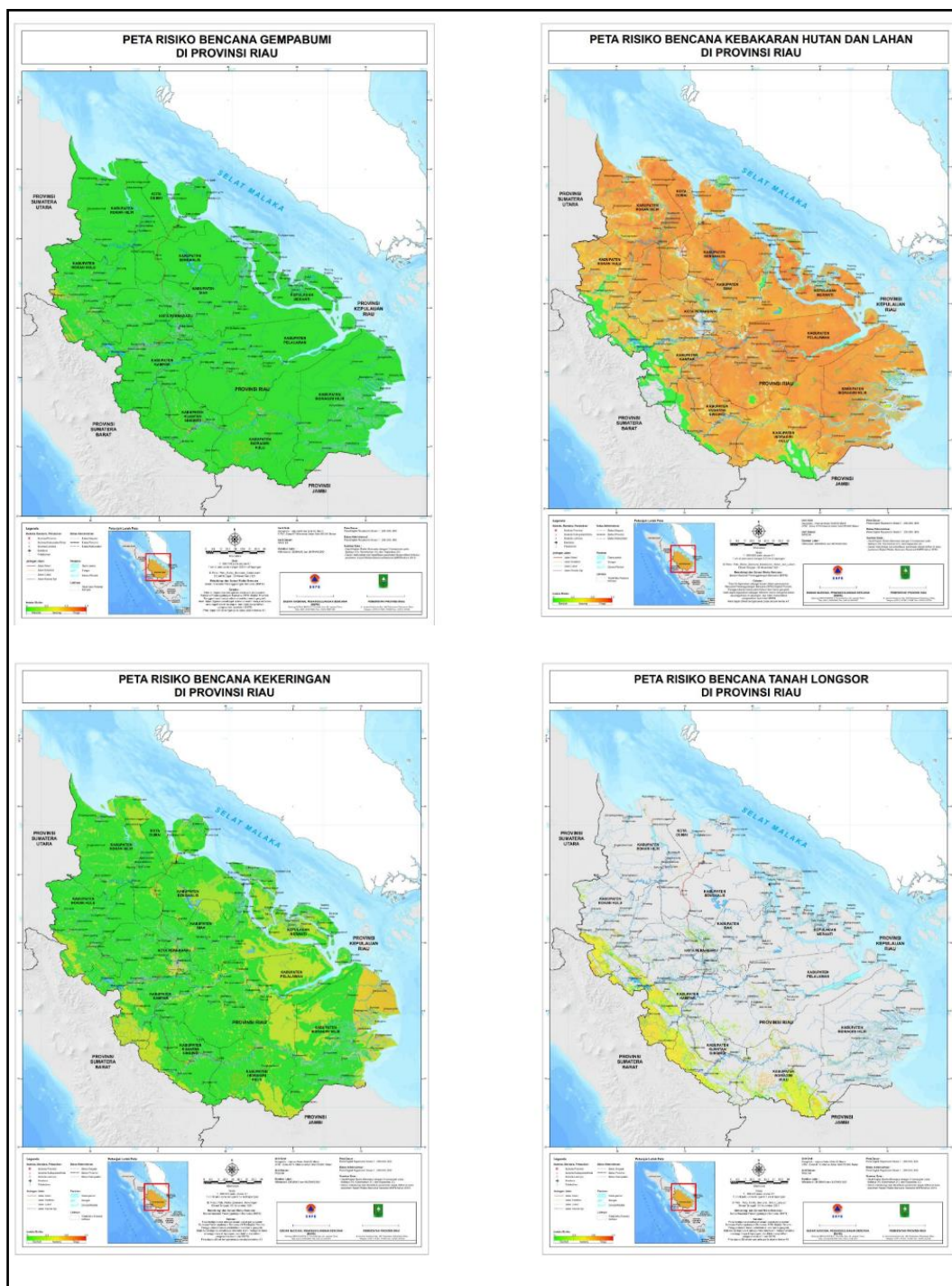
Pada grafik ini terlihat pada kurun waktu tahun 2013–2019 bahwa terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Riau terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana pada bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana banjir, longsor, abrasi yang terjadi hampir di setiap tahun. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya empat sungai besar yaitu Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Siak. Pada wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir dan bermuara di pantai timur sehingga mengakibatkan daerah ini

rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Sedangkan bencana longsor merupakan dampak yang terjadi di beberapa wilayah dan waktu tertentu akibat adanya hujan yang terus menerus. Berikut beberapa Peta Risiko Bencana di Provinsi Riau.



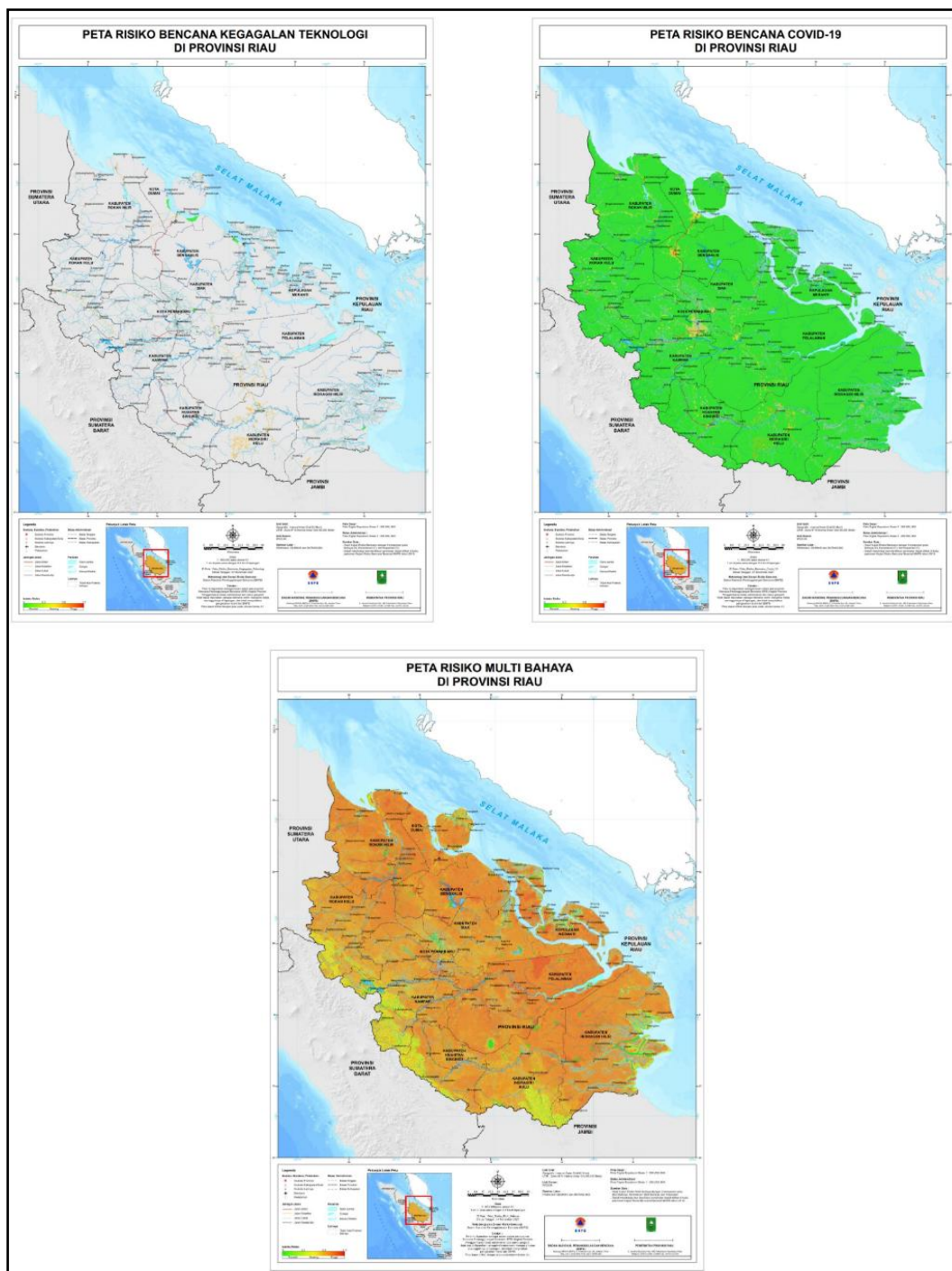
Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Abrasi
Di Provinsi Riau

Sumber: Dok. KRB Nasional Riau 2022-2026



Gambar 2.4
Peta Risiko Gempa Bumi, Karhutla, Kekeringan dan Tanah Longsor
Di Provinsi Riau

Sumber: Dok. KRB Nasional Riau 2022-2026



Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi, Covid-19 dan Multi Bahaya
Di Provinsi Riau
Sumber: Dok. KRB Nasional Riau 2022-2026

Menurut pengkajian risiko, bencana di Provinsi Riau untuk tahun 2022–2026 terdiri dari dua belas jenis, yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemii dan Wabah Penyakit, Tanah Longsor, Kegagalan teknologi dan

Covid-19. Menghadapi potensi risiko terhadap bencana tersebut, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan berbagai instansi terkait (*stakeholder*) telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana di Riau melalui program mitigasi bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, penting bagi penduduk setempat untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi yang diberikan oleh otoritas terkait dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Riau.

Sejak terbentuknya Bidang Pemadam Kebakaran dalam nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, saat ini berupaya memberikan pelayanan koordinasi bagi Damkar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Langkah awal dengan melaksanakan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Pembinaan serta pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Upaya layanan terhadap program pemadam kebakaran ini diharapkan dapat mengembangkan fungsi layanannya di masa mendatang.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024.

A. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan dan penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah provinsi;

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebagai berikut :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas unsur :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran secara *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran serta membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sehari-hari.

- (7) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Selanjutnya,

- I. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- II. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- III. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
 - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian;

antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

IV. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kesiapsiagaan, keadaan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
- b. penyelenggaraan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- c. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyusunan standar operasional dan prosedur pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penetapan status keadaan darurat bencana;

- h. pencarian, pertolongan dan evakuasi;
- i. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan korban bencana;
- j. pengelolaan bantuan darurat bencana;
- k. pengembangan kapasitas aparatur dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; dan
- l. pelaporan penanganan keadaan darurat.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- V. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penanganan kedaruratan, pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- VI. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan dan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- i. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi;
- j. koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;
- k. pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi;
- l. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana provinsi; dan
- m. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VII. Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- b. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas;
- c. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. koordinasi pencegahan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
- g. sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
- h. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan
- j. melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya hal lain yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 sebagai berikut:

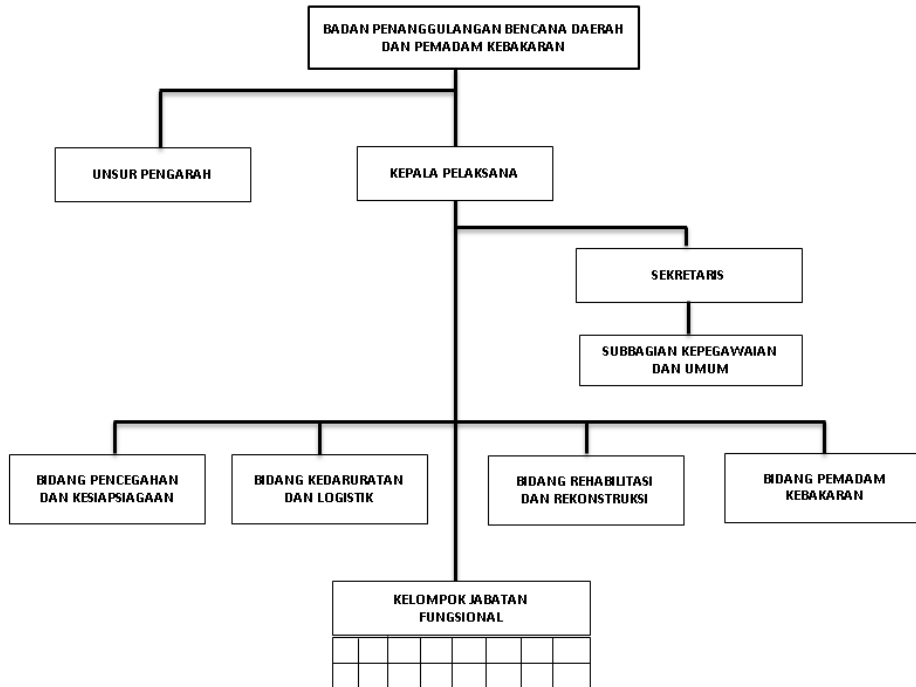
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Aturan tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau terbentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebagai berikut :



Gambar 2.6
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 87 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

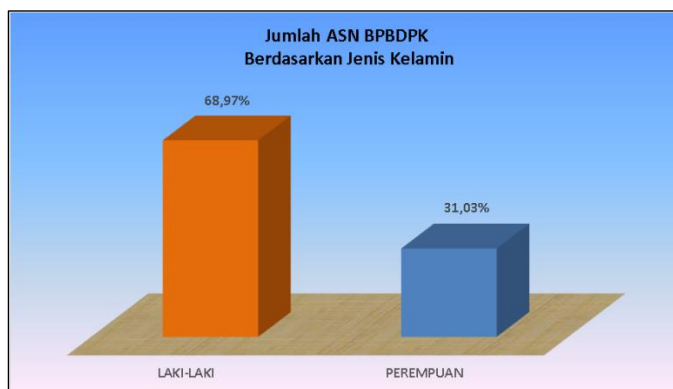
1. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Data Rekapitulasi ASN BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISABILITAS	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1	0	0	1
2	Fungsional Madya	1	1	0	2
3	Sekretariat	11	8	0	19
4	Bidang Penanggulangan bencana	47	18	0	65
JUMLAH		60	27	0	87
PERSENTASE		68,97	31,03	0,00	100,00

Sumber Data: BPBDPK, Oktober 2025

Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kinerja (PPPK). Jika melihat pada rekapitulasi jumlah data ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau lebih didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana komposisinya yaitu laki-laki 68,97% dan perempuan sebanyak 31,03% terlihat pada gambar di bawah ini. Tidak terdapat ASN yang disabilitas.



Gambar 2.7
Jumlah Aparatur Sipil Negara
BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: BPBDPK Tahun 2025

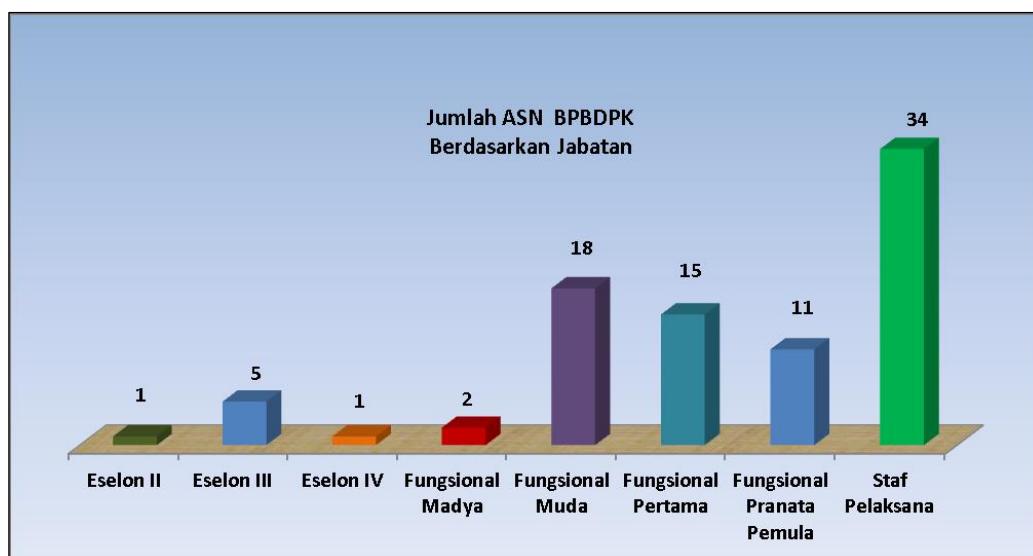
2. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan

Aparatur Sipil Negara dan PPPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau berdasarkan Jabatannya saat ini dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Data ASN BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No.	JABATAN / ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0	1	1,15
2	Eselon III	5	0	5	5,75
3	Eselon IV	1	0	1	1,15
4	Fungsional Madya	1	1	2	2,30
5	Fungsional Muda	12	6	18	20,69
6	Fungsional Pertama	8	7	15	17,24
7	Fungsional Pranata Pemula	11	0	11	12,64
8	Staf Pelaksana	21	13	34	39,08
JUMLAH		60	27	87	100,00

Dari data tersebut tampak bahwa jabatan staf pelaksana masih mendominasi sebanyak 34 orang dan diikuti oleh Jabatan Fungsional Muda sebanyak 18 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara
BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

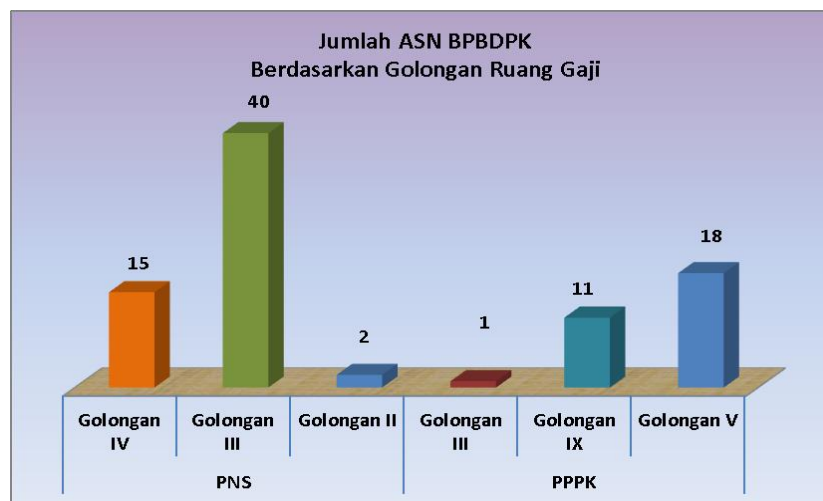
Terdapat beberapa jenis jabatan fungsional tertentu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yaitu Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang merupakan jabatan yang ikut menunjang dalam pencapaian sasaran strategis (sebanyak 28 orang), jabatan fungsional pranata pemula (sebanyak 11 orang) dan jabatan fungsional perencana (4 orang) serta Jabatan fungsional Arsiparis sebanyak (3 orang).

3. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3
Data Aparatur Sipil Negara BPBDPK Berdasarkan Golongan
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No.	Jenis Pegawai	Golongan Ruang Gaji	JUMLAH	%
1	PNS	Golongan IV	15	17,24
		Golongan III	40	45,98
		Golongan II	2	2,30
2	PPPK	Golongan III	1	1,15
		Golongan IX	11	12,64
		Golongan V	18	20,69
JUMLAH			87	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 17,24% pegawai ASN bergolongan IV dan lebih dari 45% pegawai ASN bergolongan III, selain itu pegawai PPPK dengan Golongan IX dan Golongan V masing-masing 12,64% dan 20,69%.



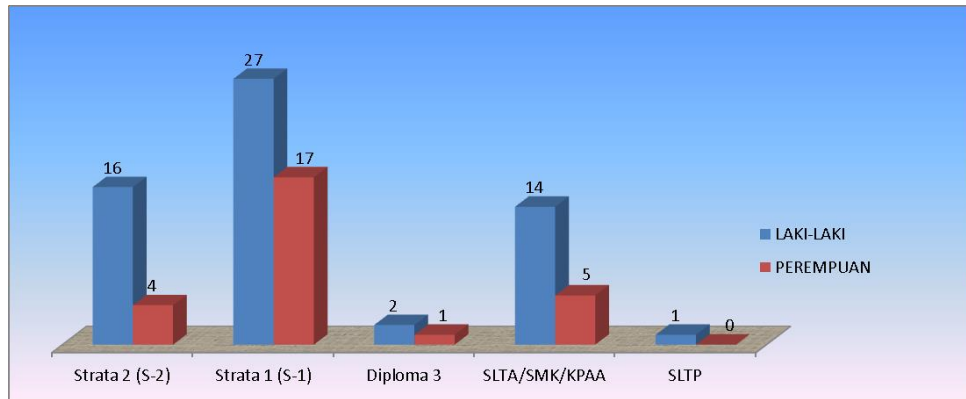
Gambar 2.9
Jumlah ASN BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

4. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2.4
Data ASN BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S-2)	16	4	20	22,99
2	Strata 1 (S-1)	27	17	44	50,57
3	Diploma 3	2	1	3	3,45
4	SLTA/SMK/KPAA	14	5	19	21,84
5	SLTP	1	0	1	1,15
JUMLAH		60	27	87	100,00

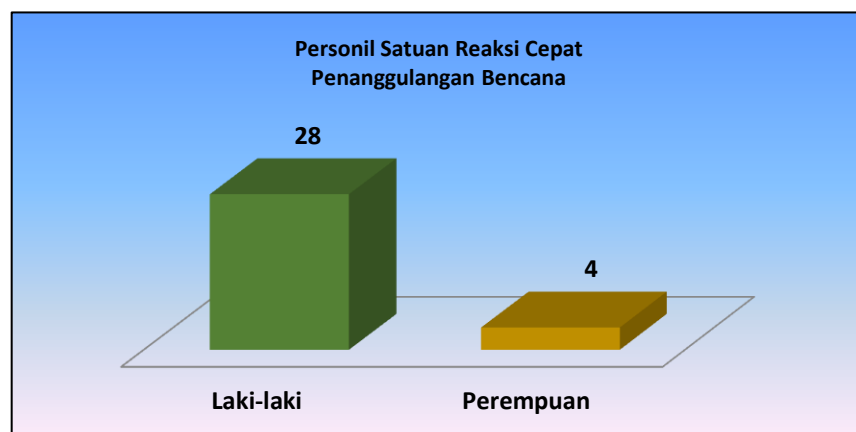
Terlihat dari tabel 2.4. dan Gambar 2.9 bahwa tingkat pendidikan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagian besar sudah berpendidikan Strata 1 (50,57%) dan Strata II (22,99%).



Gambar 2.10
Jumlah ASN BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

5. Data Jumlah Sumber Daya Manusia Terlatih dalam Penanggulangan Bencana

Data personil yang tergabung dalam Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBDPK Provinsi Riau sebanyak 32 Orang, terdiri dari 28 Orang Laki-laki (87,5%) dan 5 Orang perempuan (12,5%) sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.11
Jumlah Personil Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBDPK Provinsi Riau
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

B. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan Kantor)

Untuk kelancaran dalam mendukung pekerjaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, *Printer*, Mesin *Scanner* dan *Photocopy*, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global. Data Aset/modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBDPK Provinsi Riau
s.d. Bulan Juni Tahun 2025
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi	Jumlah s.d. Juni 2025
		B, KB, RB	Unit
1	T A N A H		2
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1
2	Tanah Bangunan Gudang	Baik	1
2	PERALATAN DAN MESIN		4.176
	Alat-Alat Besar	Baik	2.258
	Alat-Alat Besar Darat	Baik	60
	Alat Pengangkat	Baik	5
	Forklift	Baik	2
	Hand Forklift Manual	Baik	3
	Mesin Proses	Baik	55
	Water Treatment Portable (WTP)	Baik	54
	Mesin Proses Lain-lain	Baik	1
	Alat-Alat Bantu	Baik	2.198
	Pompa	Baik	172
	Pompa Air	Baik	172
	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Baik	2.026
	Veld Bed	Baik	474
	Pompa Portable	Baik	79
	Perlengkapan Kebakaran Hutan Lain-Lain	Baik	432
	Alat-Alat Angkutan	Baik	91
	Alat Angkutan Darat Bermotor	Baik	35
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Baik	7
	Mobil Jeep	Baik	2
	Station Wagon	Baik	5
	Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	Baik	1
	Kendaraan Bermotor Penumpang Lain-Lain	Baik	1
	Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan Barang	Baik	8
	Pick Up	Baik	7
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-Lain	Baik	1
	Kendaraan Dinas Bermotor Khusus	Baik	5
	Mobil Ambulance		-
	Mobil Tangki Air	Baik	2
	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-Lain	Baik	3
	Sepeda Motor	Baik	14
	Sepeda Motor	Baik	14
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Baik	3
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Angkutan Barang	Baik	3
	Gerobak Tarik	Baik	3
	Alat Angkutan Apung Bermotor	Baik	20
	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Baik	19
	Speed Boat / Motor Tempel	Baik	4
	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Lain-Lain	Baik	15
	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Baik	1
	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Lain-Lain	Baik	1
	Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	Baik	33
	Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor Khusus	Baik	33

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi	Jumlah s.d. Juni 2025
		B, KB, RB	Unit
	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) Aset Intrakomptable	Baik	21
	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) Aset Ekstrakomptable	Baik	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Baik	82
	Alat Bengkel Bermesin	Baik	22
	Perkakas Bengkel Listrik	Baik	22
	Perkakas Bengkel Listrik Lain-Lain	Baik	22
	Alat Bengkel Tak Bermesin	Baik	50
	Perkakas Bengkel (Standard Tools)	Baik	47
	Tolkit Perbengkelan	Baik	47
	Aset Intrakomptable Tolkit Perbengkelan	Baik	10
	Aset Ekstrakomptable Tolkit Perbengkelan	Baik	37
	Perkakas Bengkel Kayu	Baik	3
	Gergaji Chain Saw	Baik	3
	Alat Ukur	Baik	10
	Alat Ukur Universal	Baik	10
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik	941
	Alat Kantor	Baik	91
	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Baik	3
	Mesin Penghitung Uang	Baik	1
	Mesin Absen (Time Recorder)	Baik	2
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Baik	68
	Lemari Besi/Metal	Baik	5
	Lemari Kayu	Baik	5
	Rak Besi	Baik	13
	Filing Cabinet Besi	Baik	30
	Brandkas	Baik	1
	Tempat Menyimpan Gambar	Baik	1
	Lemari Kaca	Baik	13
	ALAT KANTOR LAINNYA	Baik	20
	Papan Visual/Papan Nama	Baik	6
	Alat Penghancur Kertas	Baik	5
	LCD Projector/Infocus	Baik	7
	Mesin Fogging	Baik	2
	Alat Rumah Tangga	Baik	615
	Alat Rumah Tangga Intrakomptable	Baik	490
	MEUBELAIR	Baik	279
	Meja Kerja Kayu	Baik	22
	Meja Resepsionis	Baik	1
	Kursi Rapat	Baik	85
	Kursi Tamu	Baik	6
	Partisi	Baik	7
	Sofa	Baik	10
	Kursi Tangan	Baik	21
	Tenda	Baik	122
	Meubelair Lain-Lain	Baik	1
	ALAT PEMBERSIH	Baik	3
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	2
	Mesin Pemetong Rumput	Baik	1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi	Jumlah s.d. Juni 2025
		B, KB, RB	Unit
	ALAT PENDINGIN	Baik	46
	Lemari Es	Baik	5
	A.C. Split	Baik	35
	Exhause Fan	Baik	6
	ALAT DAPUR	Baik	4
	Kompor Gas (Alat Dapur)	Baik	4
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Baik	158
	Televisi	Baik	4
	Sound System	Baik	4
	Microphone	Baik	4
	Mic Conference	Baik	1
	Tangga Aluminium	Baik	2
	Dispenser	Baik	2
	Karpet	Baik	1
	Gordyin/Kray	Baik	2
	Lampu	Baik	11
	Tangki Air	Baik	124
	Peralatan Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
	Lampu Hias	Baik	2
	Kursi Rapat	Baik	100
	Lampu	Baik	12
	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	Baik	235
	MEJA KERJA PEJABAT	Baik	78
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	4
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	9
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	64
	KURSI KERJA PEJABAT	Baik	133
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	2
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	9
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	9
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	113
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Baik	24
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	4
	Lemari Dan Arsip Pejabat Lain-Lain	Baik	20
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Baik	204
	Alat Studio	Baik	68
	PERALATAN STUDIO AUDIO	Baik	8
	Handy Cam	Baik	1
	CCTV	Baik	3
	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	Baik	4

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi	Jumlah s.d. Juni 2025
		B, KB, RB	Unit
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Baik	22
	Photo Tustel	Baik	19
	Tripod	Baik	3
	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Baik	38
	Kamera Udara	Baik	38
	Alat Komunikasi	Baik	123
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Baik	102
	Pesawat Telephone	Baik	1
	Telephone Mobile	Baik	1
	Handy Talky (HT)	Baik	94
	Telepon Satelit	Baik	1
	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain	Baik	5
	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Baik	21
	Unit Tranceiver Ssb Portable	Baik	21
	Peralatan Pemancar	Baik	13
	SUMBER TENAGA	Baik	13
	Genset	Baik	11
	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	Baik	2
	Peralatan Pemancar Lainnya Lain-Lain	Baik	2
	Alat Kedokteran	Baik	158
	ALAT KEDOKTERAN	Baik	158
	Aset Intrakomptable Alat Kedokteran	Baik	104
	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Baik	104
	Folding bad aluminium	Baik	2
	Tabung O2	Baik	102
	Aset Ekstrakomptable Alat Kedokteran	Baik	54
	Korentang	Baik	50
	Tandu	Baik	4
	Alat Persenjataan	Baik	261
	Persenjataan Non Senjata Api	Baik	261
	ALAT KEAMANAN	Baik	261
	Alat Keamanan Lain-Lain	Baik	261
	Aset Ekstrakomptable Alat Keamanan Lain-Lain	Baik	196
	Aset Ekstrakomptable Alat Keamanan Lain-Lain	Baik	65
	Komputer	Baik	181
	Komputer Unit	Baik	90
	PERSONAL KOMPUTER	Baik	90
	P.C Unit	Baik	61
	Lap Top	Baik	9
	Note Book	Baik	18
	Tablet PC	Baik	2
	Peralatan Komputer	Baik	91
	Aset Intrakomptable Peralatan Komputer	Baik	87

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi	Jumlah s.d. Juni 2025
		B, KB, RB	Unit
	PERALATAN MAINFRAME	Baik	1
	Hard Disk	Baik	1
	PERALATAN MINI KOMPUTER	Baik	2
	Speaker Komputer	Baik	2
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Baik	72
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	63
	External/ Portable Hardisk	Baik	9
	PERALATAN JARINGAN	Baik	2
	Router	Baik	1
	Modem	Baik	1
	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Baik	10
	Peralatan Komputer Lainnya Lain-Lain	Baik	10
	Aset Ekstrakomptable Peralatan Komputer	Baik	4
	Aset Ekstrakomptable External Floppy Disk Drive	Baik	4
	GEDUNG DAN BANGUNAN	Baik	3
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Baik	1
2	Bangunan Gudang	Baik	2
	ASET TETAP LAINNYA	Baik	254
	a. Bahan Perpustakaan	Baik	252
	b. Barang bercorak Keseniaan dan Kebudayaan	Baik	1
1	Barang Kerajinan lain-lain	Baik	1
	d. Aset Tetap Renovasi	Baik	1
	Bangunan Gedung Dalam Renovasi	Baik	1
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Baik	2
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Baik	2
JUMLAH			4.437

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

A. Evaluasi dan Capaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Provinsi Riau, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk urusan penanggulangan bencana masuk dalam urusan wajib pada “Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”. Secara khusus penanggulangan bencana ada pada urusan perlindungan masyarakat dengan pemenuhan jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal yaitu untuk kewenangan Provinsi meliputi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi.
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi.
3. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Dalam amanat penerapan SPM untuk BPBDPK Provinsi tersebut secara tugas pokok dan fungsi berbenturan dengan tugas pokok dan fungsi OPD lain yaitu untuk poin pertama berbenturan dengan tupoksi Dinas Kesehatan, sedangkan untuk poin kedua berbenturan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau, sedangkan untuk point ketiga berbenturan dengan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Riau. oleh karena itu, untuk BPBDPK Provinsi Riau hanya bersifat pengumpulan data SPM yang menjadi kewenangan Provinsi dengan menginventarisasi data yang ada di beberapa OPD terkait bencana Provinsi, serta membantu inventarisasi data capaian SPM BPBDPK Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tupoksi BPBD Kabupaten/Kota yaitu pada amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau terbentuk pada tahun 2010 dan memiliki anggaran mulai pada Tahun 2011. Dalam kurun waktu 2011–2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau terus melakukan pembenahan untuk penguatan kelembagaan untuk pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga, di akhir Tahun 2024 tepatnya Bulan Oktober telah berubah nomenklatur menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau hingga saat ini. Terbentuknya BPBDPK melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPBDPK.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau berdasarkan sasaran/target Renstra BPBDPK Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: Kinerja pelayanan BPBDPK Provinsi Riau dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Ketercapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra BPBDPK Provinsi Riau.

Capaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, dapat dilihat dari tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Target dan Capaian Kinerja BPBD Tahun 2019-2024
(Sumber: BPBDPK Tahun 2019-2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	100%	100%	100%			90.50%	83.08%	99.92%		
2.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau				100%					99.89%	
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau					0,58					0,57

Untuk sasaran strategis dan indikator kinerja pada periode 2019-2024 mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

a) Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020-2022

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau. Tingkat capaian di tahun 2020 dengan indikator Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau sebesar 90,50 %, di tahun 2020 terjadi penurunan yang diakibatkan adanya pembatasan kegiatan sosial akibat COVID-19 sehingga capaian sebesar 83,08% dan capaian di tahun 2022 sebesar 99,92% artinya kembali mengalami peningkatan.

b) Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan indikator Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau. Capaian di tahun ini sebesar 99,89 %. untuk sasaran strategis ini didukung oleh 2 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

c) Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau. Capaian indeks diperoleh sebesar 0,57 dari target sebesar 0,58, sehingga capaian diperoleh sebesar 98,27% untuk sasaran strategis ini didukung oleh 2 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Adapun faktor pendukung Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di tahun 2024 adalah ukuran capaian indeks prioritas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 2.7.

Kondisi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau 2019-2024 terbagi atas tiga sasaran di lapangan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dalam menanggulangi bencana di Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

1. Kondisi Titik Api (Hotspot) tahun 2022 – 2024

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kondisi Titik Api(Hotspot) Karhutla Tahun 2022-2024
(Sumber: BPBDPK Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	2022		2023		2024	
		Hotspot	Luas Terbakar(Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)
1	Rokan Hilir	299	202.50	238	238.00	283	98.5
2	Rokan Hulu	256	336.00	176	50.60	129	35.4
3	Dumai	85	52.45	242	118.67	261	234.15
4	Bengkalis	76	153.90	218	400.29	186	138.33
5	Meranti	43	32.35	47	89.11	389	165.64
6	Siak	113	18.56	145	57.06	136	133.91
7	Pekanbaru	6	19.21	13	46.67	9	40.93
8	Kampar	150	150.89	121	198.94	98	128.45
9	Pelalawan	214	113.20	283	261.73	304	426.83
10	Indragiri Hulu	172	79.25	1214	578.14	456	777.17
11	Indragiri Hilir	152	85.50	459	342.75	381	247.80
12	Kuantan Singingi	86	0.50	165	50.75	142	77.80
TOTAL		1652.00	1244.31	3321	2432.71	2.774	2.504

Dari tabel tersebut tampak ada peningkatan titik api (hotspot) dan luas daerah yang terbakar di tahun 2023, walaupun ada sedikit penurunan di tahun 2024, fluktuasi titik api dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau periode 2022-2024 meliputi beberapa kegiatan penanggulangan bencana yaitu :
 - a. Penanggulangan melalui Satgas Darat

Satgas Darat mengerahkan petugas darat yang terdiri dari Personil BPBD Kabupaten/Kota, Manggala Agni, Polri, TNI dan masyarakat setempat, tempat terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu juga dilakukan pada saat di awal masuk musim kemarau dengan penyebaran himbauan dalam *leaflet* dan pemasangan spanduk larangan membakar hutan dan lahan.
 - b. *Water Bombing*/Satgas Udara

Dalam kurun tahun 2022-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mendapatkan bantuan/dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Pesawat dan Helikopter *Fire-Fighting* untuk membantu pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, kegiatan patroli udara dan *water bombing*.
 - c. Penegakan Hukum

Pada kurun waktu tahun 2021-2024 beberapa pelanggaran telah ditertibkan oleh Satgas Penegakan Hukum.

Bencana Hidrometeorologi

Kondisi bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau pada tahun 2023 terjadi bencana banjir 59 kali yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kabupaten/Kota yang selalu terjadi bencana banjir yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya jumlah kejadian bencana longsor/abrasi sebanyak 12 kejadian. Bencana Angin puting beliung sebanyak 15 kejadian. Fasilitas yang terdampak bencana alam di Provinsi Riau tahun 2023 yaitu fasilitas pendidikan 20 unit rusak ringan, fasilitas perkantoran 7 unit rusak ringan, fasilitas umum 37 unit rusak ringan dan 5 unit rusak berat, kerusakan jalan sepanjang 20 km, kerusakan lahan dan kebun 489 hektar.

Sedangkan kondisi bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau pada tahun 2024 terjadi bencana banjir 734 kali yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi paling banyak terjadi frekuensi terjadi banjir, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya jumlah kejadian bencana longsor/abrasi sebanyak 41 kejadian, bencana angin puting beliung sebanyak 24 kejadian. Fasilitas yang terdampak bencana alam di Provinsi Riau tahun 2024 yaitu rumah penduduk 205 unit rusak berat, fasilitas pendidikan 156 unit rusak ringan, fasilitas kesehatan 29 unit rusak ringan, fasilitas perkantoran 45 unit rusak ringan, fasilitas umum 205 unit rusak ringan dan 5 unit rusak berat, turab/tebing rusak sepanjang 15 km, kerusakan jalan sepanjang 69 km serta lahan dan kebun mengalami kerusakan sebanyak 1229 hektar.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2019-2024 menurut SPM (untuk urusan wajib) merupakan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau secara umum dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel T.C-23. dan tabel T.C-24 sebagai berikut :

Tabel 2.8 (T.C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen			5	5			5	5			1	1
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan			2	2			2	2			1	1
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang	60	60	60	60	60	60	60	77	1	1	1	1
4	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Dokumen		1	2	2		1	2	2		1	1	1
5	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Paket	2		2	2	2		2	2	1		1	1
6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
7	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	10	2	2	2	10	5	2	2		0,5	1	1
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	3	3	3	3	3	9	3	3	0	3	1	1
9	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	4	5	5	5	4	12	5	5	0	2,4	1	1
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	2	2	2	2	2	6	2	2	0	3	1	1

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
11	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
12	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Unit		15	15	15		15	15	15		1	1	1
13	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit			1	1							1	
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
17	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Unit	21	21	21	21	21	21	21	21	1	1	1	1
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit	27	81	69	69	27	81	69	69	1	1	1	1
19	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	5	3	2	2	5	9	2	2	1	3	1	1

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
20	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota			Orang	5	33	100	100	5	69	100	100	1	3	1	1
21	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan			Dokumen	1	1			1				1	1		
22	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Orang			60	60			60	60			1	1
23	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana			Unit	541		5	86	541	2	86	86				1
24	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			Dokumen	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
25	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Kawasan	2	2	3	12	2	2	3	3	1	1	1	1
26	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana			Orang	50	80	50	50	50	80	50	50	1	1	1	1
27	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi			Dokumen			1	1		1	1	1		0	1	1
28	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan			Laporan		1	3	1		1	3	1		1	3	1
29	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			Dokumen			1	1		1	1	1		0	1	

No	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
30	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			Laporan			1	1								
31	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana			Laporan	2	4	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1
32	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Orang	500	100	700	700	500	600	700	700	1	6	1	1
33	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Laporan	1		1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
34	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			Dokumen			1	1			1	1			1	1
35	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			Dokumen	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
36	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			Dokumen		1	1	1		1	1	1		1	1	1
37	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			Dokumen	1	1	1	1		3	1	1		3	1	1
38	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana			Laporan		1	1	1		1	1	1		1	1	1
39	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			Dokumen		1	1	1		1	1	1		1	1	1
40	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Dokumen	1				1				1			1

Tabel 2.9 (T.C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau			Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10.158.843.867	2.728.207.448	4.325.000.000		3.491.501.824	1.853.364.799			34%	68%		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12.232.963.933	12.428.370.400	14.175.000.000		11.988.736.704	13.570.761.423			98%	109%		
2	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau			Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			4.325.000.000				5.386.426.982				125%	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			14.175.000.000				15.555.155.724				110%	
3	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau			Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				6.465.421.188				6.090.031.555				94%
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				16.469.027.847				15.827.749.386				96%

Dapat dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki 2 (dua) program kegiatan yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintah dan program penanggulangan bencana. Pada tahun 2021 untuk urusan program penanggulangan bencana, target renstra sebesar Rp. 10.158.843.867 terealisasi sebesar Rp. 3.491.501.824 atau 34% dan urusan administrasi perkantoran target Rp. 12.232.963.933 terealisasi Rp. 11.988.736.704 atau sebesar 98%. Selanjutnya di tahun 2022 pada urusan program penanggulangan bencana target renstra sebesar Rp. 2.728.207.448 terealisasi sebesar Rp. 1.853.364.799 atau sebesar 68% dan urusan administrasi perkantoran, dari Rp 12.428.370.400 terealisasi Rp 13.570.761.423 atau 109%. Sedangkan di tahun 2023 pada urusan program penanggulangan bencana yang direncanakan Rp. 4.325.000.000 terealisasi Rp. 5.386.426.982 atau sebesar 125% dan urusan administrasi perkantoran, dari Rp 13.668.002.150 terealisasi Rp 15.555.155.724 atau 110%. Sedangkan di tahun 2024, pada urusan program penanggulangan bencana yang direncanakan Rp. 6.465.421.188 terealisasi Rp. 6.090.031.555 atau sebesar 94% dan urusan administrasi perkantoran, dari Rp 16.469.027.847 terealisasi Rp 15.827.749.386 atau 96%. Adapun di tahun 2024 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berubah nomenklatur menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau.

Pada tahun 2021 realisasi sebesar 34% terjadi karena adanya kendala pada saat pandemi Covid 2019, adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat membuat beberapa kegiatan tidak berjalan maksimal. Sedangkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dan 2023, dimana pandemi sudah berakhir, sehingga realisasi sudah beranjak kian membaik dan kegiatan sudah dapat berjalan dengan normal. Di tahun 2024, persentase pertumbuhan mencapai 94% untuk program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan capaian 96% untuk pemenuhan administrasi perkantoran. Capaian ini meningkatkan indikator kinerja kunci BPBDPK Provinsi Riau. Realisasi capaian yang sangat baik ini disebabkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk penanganan bencana baik itu dalam tahapan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Sebagaimana komitmen BPBDPK mendukung terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama yaitu meningkatnya ketahanan daerah di Provinsi Riau dalam menghadapi bencana.

B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administratif. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. IKD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem peringatan dini.

Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI. IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (*evidence*) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi sampai dengan tahun 2024 ini secara umum tetap berasal dari 7 (tujuh) indeks prioritas, artinya BPBDPK telah dapat mempertahankan kondisi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana ini dari tahun sebelumnya. BPBDPK terus berupaya fokus pada prioritas ini untuk peningkatan di tahun mendatang.

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau untuk Tahun 2023-2024 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian IKD Tahun 2023 s.d 2024
(Sumber: BNPB Tahun 2025)

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	
		2023	2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,87	0,88
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90	0,90
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,74	0,76
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,93	0,53
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,30	0,37
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,43	0,52
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,70	0,66
INDEKS KETAHANAN DAERAH		0,57	0,57

Secara umum terdapat peningkatan pada beberapa prioritas yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan dan logistik, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Nilai IKD ini diharapkan dapat terus meningkat sehingga dengan meningkatnya nilai IKD akan menurunkan Indeks risiko bencana (IRB) di Provinsi Riau.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, pada pasal 437 ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Penanggulangan menyelenggarakan tugas Bencana membantu Daerah Gubernur melaksanakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Hal tersebut menyiratkan bahwa di BPBD Provinsi Riau sudah terdapat sub urusan kebakaran dan harus mempersiapkan sumber daya baik personil, peralatan serta ilmu pengetahuan termasuk anggaran untuk menunjang dalam pelaksanaan urusan kebakaran di tingkat provinsi.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga penanggulangan bencana agar mencapai tujuan pembangunan daerah yang dapat meminimalisir risiko bencana. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana.

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Provinsi Riau, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Adapun kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau terdiri atas:

1. Aparatur yang menangani masalah penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
2. Masyarakat yang terkena dan terdampak bencana.
3. *Stakeholder* lain yang terlibat.

2.1.5. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menyatakan untuk urusan penanggulangan bencana masuk dalam urusan wajib pada “Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”. Secara khusus penanggulangan bencana ada pada urusan perlindungan masyarakat dengan pemenuhan jenis Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal yaitu untuk kewenangan Provinsi meliputi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi.
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi.
3. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Dalam amanat penerapan SPM untuk BPBDPK Provinsi tersebut secara tugas pokok dan fungsi berbenturan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yaitu untuk poin pertama berbenturan dengan tupoksi Dinas Kesehatan, sedangkan untuk poin kedua berbenturan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau, sedangkan untuk poin ketiga berbenturan dengan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Riau. Oleh karena itu, untuk BPBDPK Provinsi Riau hanya bersifat pengumpulan data SPM yang menjadi kewenangan Provinsi dengan menginventarisasi data yang ada di beberapa perangkat daerah terkait bencana Provinsi, serta membantu inventarisasi data capaian SPM BPBD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tupoksi BPBD Kabupaten/Kota yaitu pada amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.

Selain itu BPBDPK Provinsi Riau juga bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat. Adapun kerjasama tersebut dengan perusahaan-perusahaan swasta di Provinsi Riau serta organisasi-organisasi masyarakat seperti PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) yang telah memberikan bantuan berupa mesin pompa air untuk pemadam kebakaran di tahun 2025. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Riau yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa sembako di tahun 2024 dalam penanganan bencana di Provinsi Riau dan provinsi sekitar.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian kinerja terkait penanggulangan kebencanaan saat ini masih belum mendapatkan dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau telah menjalin kerjasama dengan Provinsi yang bersebelahan dengan Provinsi Riau seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan situasi darurat di wilayah yang berbatasan dengan provinsi tetangga. Bentuk kerjasama dengan Provinsi tetangga ini terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak perguruan tinggi seperti Universitas Riau dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Payung Sekaki. Kerjasama ini berbentuk kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pelayanan kesehatan dalam pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Provinsi Riau

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan aspek klimatologis, topografi, geografis dan geologis, Provinsi Riau memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana. Daerah yang rawan akan bencana yang dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim. Secara umum, bencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin kencang). Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, kebakaran dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang mengemban urusan wajib pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kualitas penanggulangan bencana tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan, permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau terkait tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 40 orang sampai dengan 55 orang relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia secara gender yang terlatih dalam penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan 5. Keterbatasan perempuan terhadap informasi dan sumber daya menghadapi bencana.
2	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	Sarana dan Prasarana masih belum representatif bagi peralatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan peralatan <i>Early Warning System (EWS)</i> bencana banjir di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.
3	Diperlukan upaya untuk mendukung mitigasi bencana di masyarakat	Kesadaran masyarakat/gender dalam upaya pengurangan risiko bencana masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas. 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran gender/masyarakat terhadap bencana masih belum maksimal.

Isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan (PB) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, yang di dalamnya mengkaji juga ketercapaian TPB/SDGs Riau. Diharapkan pada tahun 2030, dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota dapat dikurangi. Pada tahun 2030, implementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

Berdasarkan hasil telaahan dari berbagai aspek seperti tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra BNPB dan Renstra BPBD Kabupaten/Kota serta dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat disimpulkan beberapa hal (pendorong dan penghambat) yang mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yaitu :

A. Faktor Pendorong

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.
2. Dukungan pimpinan dan partisipasi *stakeholder* terkait bencana.
3. Komitmen organisasi melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana.
4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Faktor Penghambat

1. Kualitas dan kuantitas aparatur (baik laki-laki maupun perempuan) dalam penanggulangan bencana belum memadai
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana *Early Warning System* (EWS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bidang penanggulangan bencana di daerah, memang mulai menjadi isu prioritas di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait bidang kebencanaan. Potensi ancaman bencana pada umumnya baru sebatas dijelaskan dan dideskripsikan dalam aspek geografis serta demografis kedaerahan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Ancaman bencana ini belum diangkat menjadi isu strategis pembangunan daerah ataupun telah dicantumkan sebagai isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD. Namun tidak menjadi visi/misi politik calon kepala daerah. Akibat kurangnya perhatian mengenai isu kebencanaan ini, penganggaran bagi penanggulangan bencana di daerah dari sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) belum dapat mencukupi.

Sumber pendanaan yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran hanya dapat mengakomodir sebagian kecil dari besarnya dampak negatif yang dihasilkan oleh kejadian bencana dan sumber pendanaan ini juga tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran maupun SKPD lainnya terutama dalam hal penanggulangan bencana ditahap pasca bencana yang biasanya memerlukan dana besar untuk pemulihan seperti sedia kala.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pra bencana dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yang sebelumnya dengan mempertimbangkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau. Sebelumnya, terdapat perubahan fase penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi pra bencana. RPB ini memuat pengenalan ancaman dan kerentanan masyarakat, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, serta alokasi

tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia di daerah. Proses penyusunan RPB memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD dalam pembagian tugas dan mengenali kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau ke dalam RPJMD merupakan upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas daerah di daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut mengharuskan adanya kapasitas perencana untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontinjensi.

Selain itu, keterlibatan gender dalam penanggulangan bencana menjadi hal penting karena perempuan rentan, tetapi juga memiliki kapasitas kuat sebagai agen perubahan, sehingga perlu diintegrasikan dalam semua tahapan bencana untuk memastikan kebutuhan dan perspektif mereka terpenuhi dalam upaya kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi. Perlu diketahui bahwa dalam penanggulangan bencana, *gender policy* sangat penting ketika kita membicarakan resiko yang sangat besar terhadap perempuan. Maka dari itu kebijakan berbasis gender dalam penanggulangan berbasis bencana sangat penting terutama keterlibatan perempuan dalam semua tahapan.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, baik faktor pendorong dan penghambat serta isu-isu yang berkembang seputar penanggulangan bencana dalam RPJMD dapat dipakai untuk melakukan metoda analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat* (SWOT), sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12. Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2025-2029.

Tabel 2.12
Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
(Sumber: BPBDPK Tahun 2025)

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	PELUANG (OPPORTUNITIES)	TANTANGAN (THREATS)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain. Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat secara gender dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
KEKUATAN (STRENGTHS)	Alternatif Strategi (S - O)	Alternatif Strategi (S - T)
<ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Dukungan pimpinan BPBDPK Provinsi Riau dan partisipasi stakeholder terkait bencana. Komitmen organisasi melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana. Tersedianya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tersedianya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBDPK Provinsi Riau. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Regulasi dan Kelembagaan Melalui upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat Menyusun dokumen kebencanaan yang berbasis masyarakat dan keterlibatan kaum rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, orangtua dan penyandang disabilitas Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan kebencanaan untuk pengurangan risiko bencana. Penguatan kapasitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana secara akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan resiko bencana Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Peningkatan koordinasi BPBDPK Provinsi Riau dengan Legislatif tentang anggaran penanggulangan bencana. Meningkatkan kapabilitas aparatur dan kelembagaan pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Meningkatkan sistem informasi terkait penanggulangan bencana. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
KELEMAHAN (WEAKNESSES)	Alternatif Strategi (W - O)	Alternatif Strategi (W - T)
<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBDPK Provinsi Riau untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masih terbatasnya sarana dan prasarana BPBDPK Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur secara gender dalam penanggulangan bencana pada BPBDPK Provinsi Riau. Perlunya dana siap pakai/dana tak terduga untuk penanggulangan bencana. Memperhatikan karakter bencana daerah dan budaya masyarakat setempat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik. Pengembangan sistem informasi data terkait pasca bencana. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendata perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana. Mengarahkan kebijakan dunia usaha dalam mendukung penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peranan aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Meningkatkan peranan aparatur penanggulangan bencana serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Mengembangkan kelembagaan penanggulangan bencana yang melibatkan instansi terkait. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Meningkatkan kapasitas aparatur terkait penanggulangan bencana. Meningkatkan sistem informasi dan koordinasi antar instansi terkait penanggulangan bencana.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Penanggulangan bencana daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan

(4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*).

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dilakukan pembobotan untuk masing-masing kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) untuk menentukan posisi kondisi BPBDPK Provinsi Riau saat ini ada dimana agar dapat memilih strategi yang tepat dengan menentukan sumbu x dan y analisa SWOT tersebut. Berikut hasil pembobotan yang dilakukan dan posisi kuadran BPBDPK yaitu :

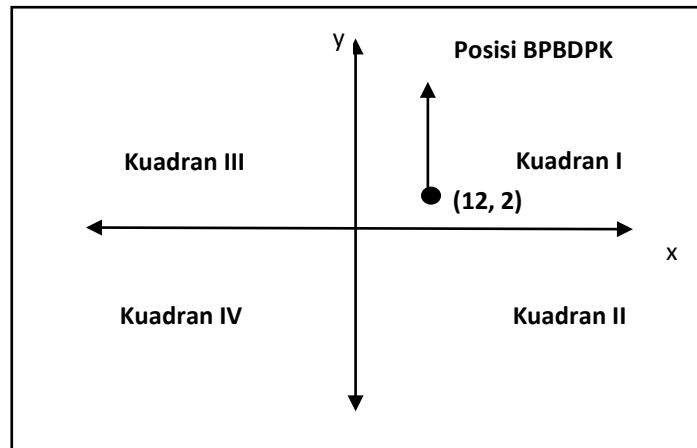
Tabel 2.13
Hasil Pembobotan Analisis SWOT BPBDPK

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Skor	Bobot	Total
1.	Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.	1	6	6
2.	Dukungan pimpinan BPBDPK Provinsi Riau dan partisipasi stakeholder terkait bencana.	2	5	10
3.	Komitmen organisasi melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana.	3	4	12
4.	Tersedianya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	4	3	12
5.	Tersedianya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBDPK Provinsi Riau.	5	2	10
Total Kekuatan (<i>Strengths</i>)				50
No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Skor	Bobot	Total
1.	Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai.	1	3	3
2.	Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing.	2	2	4
3.	Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD Provinsi Riau untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	3	5	15
4.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana BPBD Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	4	4	16
Total Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)				38
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Skor	Bobot	Total
1.	Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	1	5	5
2.	Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.	2	1	2
3.	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	3	4	12
4.	Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat.	4	2	8
5.	Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.	5	3	15
Total Peluang (<i>Opportunities</i>)				42
No	Tantangan (<i>Threats</i>)	Skor	Bobot	Total
1.	Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.	1	5	5
2.	Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.	2	2	4
3.	Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.	3	4	12
4.	Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.	4	1	4
5.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.	5	3	15
Total Tantangan (<i>Threats</i>)				40

Maka Koordinat sumbu x (S-W) = $50 - 38 = 12$

Koordinat sumbu y (O-T) = $42 - 40 = 2$

Berdasarkan hasil tersebut kondisi BPBDPK ada di Kuadran I



Dari hasil analisis tersebut maka strategi yang menjadi prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah strategi yang bersifat mendukung ke bawah/masyarakat sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana, berikut beberapa strategi yang terangkum di kuadran I dari hasil analisis SWOT yaitu :

1. Menyusun regulasi dan kelembagaan melalui upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat.
2. Menyusun dokumen kebencanaan yang berbasis masyarakat.
3. Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan kebencanaan untuk pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
5. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana secara akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan data yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 tentang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, diperlukan penanggulangan terhadap kerawanan bencana akibat adanya perubahan iklim, untuk menjaga potensi daerah dengan kondisi lingkungan yang alami tetap terjaga. Dengan resiliensi iklim dimana perubahan iklim dapat terjadi sewaktu-waktu, perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya mitigasi yang dapat mengurangi perubahan iklim adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi di Provinsi Riau.

Isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim.

2. Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas aparatur tanggap darurat bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta dalam penanggulangan bencana.

Beberapa saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan sinergitas penyelenggaraan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
2. Kegiatan sosialisasi, pelatihan mitigasi bencana, penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut kepada aparatur dan masyarakat;
3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu dioptimalkan;
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan peralatan untuk pemadaman masih sangat dibutuhkan;
6. Manajemen logistik dan peralatan penanganan darurat bencana serta informasi penanggulangan bencana perlu dioptimalkan.

Dari berbagai isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Isu Strategis BPBDPK Provinsi Riau
(Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2025)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU KLHS YG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga	Kerawanan bencana, pengelolaan lingkungan pesisir, pencemaran, penyediaan RTH perkotaan	Penanganan bencana alam yang disebabkan perubahan iklim, salah satu upaya mitigasi yang dapat mengurangi perubahan iklim adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan	Masih tingginya kerusakan dan pencemaran di Provinsi Riau menjadi tantangan penurunan emisi gas rumah kaca	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan Bencana	Pengendalian Kerusakan Lingkungan hidup melalui Program Penanggulangan Bencana dan Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Dari Tabel 2.14 di atas, dapat dikatakan bahwa isu strategis yang relevan terkait kerawanan bencana akibat perubahan iklim di Provinsi Riau meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Banjir dan Tanah Longsor: Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor.
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Karhutla merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Riau, terutama saat musim kemarau. Pemerintah Provinsi Riau: Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan serta Apel Siaga Karhutla Nasional.
3. Abrasi dan Perubahan Iklim: Pesisir Provinsi Riau terancam abrasi, penurunan permukaan tanah, serta kerusakan hutan mangrove dan lahan gambut. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca, meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem yang dapat memicu banjir.
4. Degradasi Lingkungan: Deforestasi dan kerusakan ekosistem lainnya mengurangi kemampuan alam untuk meredam dampak cuaca ekstrem.

Hal ini berkorelasi dengan isu strategis daerah Provinsi Riau yaitu:

- Pembangunan Berkelanjutan: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, yang dapat mendukung pencapaian target emisi nol pada 2060.
- Kepemimpinan Lokal: Pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi perubahan iklim melalui inisiatif seperti *Green for Riau* dan program restorasi lahan gambut

Dengan demikian, isu strategis terkait kerawanan bencana akibat perubahan iklim di Provinsi Riau memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Visi Gubernur Riau yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, disesuaikan untuk menyelaraskan dimensi waktu dengan visi pembangunan jangka panjang Nasional dan dimensi tempat dengan memperhatikan perkembangan terkini. Perumusan visi pembangunan tahun 2025 mempedomani visi RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Adapun visi tersebut adalah **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)”**. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah **misi ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan”**. Dengan tujuan **“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari”** Dalam rangka mendukung misi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau merumuskan tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 sesuai dengan rentang waktu RPJMD Provinsi Riau.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana”** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah(IKD).

3.2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana**, yang penentuannya didasarkan pada Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu

Mengurangi Risiko Bencana Daerah dengan indikator capaiannya adalah Indeks Risiko Bencana Daerah. Adapun sasaran ini dilaksanakan melalui program strategis **Riau Mantap**. Selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana”** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan sasaran BPBDPK dijabarkan menjadi tiga sasaran yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,57	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	100	100	100	100	100	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	66,75	66,78	66,8	66,82	66,85	66,87	66,9	

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yang nantinya akan dipetakan kedalam sub kegiatan. Adapun tujuh prioritas ketahanan daerah yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan.
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.
4. Penanganan tematik kawasan rawan Bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

3.3. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu dan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Dalam rangka mendukung RPJMD Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran maka strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau adalah Mengurangi Risiko Bencana Daerah dengan Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana. Dengan menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Riau maka akan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam menghadapi bencana. Adapun program yang mendukung strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

3.4. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau yaitu Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan

Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 yang tercantum di dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut: **Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana**. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Riau dan dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat. Faktor kesenjangan gender yang terjadi dalam penanggulangan bencana menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Keterbatasan kelompok rentan seperti perempuan, anak, ibu hamil, dan kaum disabilitas terhadap akses informasi dan sumber daya dalam menghadapi bencana merupakan hal yang perlu segera diatasi dengan kebijakan dan program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau. Pemberian informasi dan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, sebaiknya terus dilanjutkan secara kontinu sebagai suatu kebijakan dukungan terhadap peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Arah kebijakan Renstra BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBDPK dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBDPK, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

NO	SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berikut sandingan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029 terhadap sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam berikut:

Tabel 3.3 (T-C.26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

Visi : Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)			
Misi : "Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan".			
SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana masuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam RPJMD masih masuk sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai *Ex. Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai dasar manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 memiliki fungsi “istimewa” yang tidak dimiliki perangkat daerah lainnya yaitu Fungsi Komando, Fungsi Koordinasi dan Fungsi Pelaksana.

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Upaya dalam mendukung Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran adalah terlaksananya program prioritas yang mencakup beberapa bagian penting antara lain penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan, serta peningkatan SDM dan sarana prasana. Perumusan visi pembangunan tahun 2025 mempedomani visi RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Adapun visi tersebut adalah **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)”**. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah **misi ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka**

Pembangunan yang Berkelanjutan". Dengan tujuan **"Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari"** Dalam rangka mendukung misi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau merumuskan tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 sesuai dengan rentang waktu RPJMD Provinsi Riau. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut **"Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana"** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah(IKD). Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana**, yang penentuannya didasarkan pada Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu **Mengurangi Risiko Bencana Daerah** dengan indikator capaiannya adalah Indeks Risiko Bencana Daerah. Adapun sasaran ini dilaksanakan melalui program strategis **Riau Mantap**. Selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yaitu **"Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana"** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah(IKD), dan sasaran BPBDPK dijabarkan menjadi tiga sasaran yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN							
- Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)		
					Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	105.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya penyampaian informasi dan edukasi kepada warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	105.03.101 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	105.03.1010004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
				Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKP DB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	105.03.102.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	105.03.102.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	105.03.102.0025 - Penyusunan Rencana Kontinjensi	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	105.03.102.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	105.03.102.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	105.03.102.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	105.03.102.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	105.03.102.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
				Terpenuhinya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	105.03.103 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	105.03.103 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	105.03.103 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	105.03.103 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	105.03.103.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	105.03.103.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	105.03.103.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	105.03.103.0031- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	105.03.104.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	105.03.104.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	105.03.104.0011- Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	105.03.104.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	105.03.104.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	105.03.104.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	105.03.104.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	
			Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	105.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	105.04.1010004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	105.04.1010018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	105.04.1010021- Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	105.04.1010027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	105.04.1010030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	105.04.102 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	105.04.102.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	105.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	105.01.101- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	105.01.101- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	105.01.101.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	105.01.101.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	105.01.102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	105.01.102.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	105.01.103 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	105.01.103.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105.01.105 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105.01.105.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	105.01.106 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		105.01.106 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		105.01.106.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		105.01.106.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		105.01.106.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	105.01.107 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	105.01.107 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	105.01.107.0005 - Pengadaan Mebel		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	OUTCOME <i>(04)</i>	OUTPUT <i>(05)</i>	INDIKATOR <i>(06)</i>	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(07)</i>	KETERANGAN <i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	105.011.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	105.011.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	105.011.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	105.011.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	105.011.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	105.011.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	105.011.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105.011.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105.011.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	105.011.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105.011.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105.011.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	105.011.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri dari tiga program, 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

- a. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
- b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Penyusunan Rencana Kontijensi
- d. Pengelolaan resiko bencana
- e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- g. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- h. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi
- b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- c. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- b. Koordinasi penanganan pasca bencana
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat
- d. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
- e. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

- f. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- g. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- a. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- c. Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17.117.785.201,00		17.878.978.727,00		18.411.249.824,00		18.956.637.219,00		19.438.908.598,00		
1.05.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.657.844.582,00		15.381.201.513,00		15.800.096.050,00		16.228.695.311,00		16.626.106.589,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	14.657.844.582,00	100	15.381.201.513,00	100	15.800.096.050,00	100	16.228.695.311,00	100	16.626.106.589,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.1.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
1.05.01.1.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
1.05.01.1.01.0007- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.036.844.582,00		12.325.201.513,00		12.919.096.050,00		13.132.695.311,00		13.358.606.589,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/)	77	87	12.036.844.582,00	90	12.325.201.513,00	90	12.919.096.050,00	90	13.132.695.311,00	90	13.358.606.589,00		
1.05.01.1.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.036.844.582,00		12.325.201.513,00		12.919.096.050,00		13.132.695.311,00		13.358.606.589,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/)	77	87	12.036.844.582,00	90	12.325.201.513,00	90	12.919.096.050,00	90	13.132.695.311,00	90	13.358.606.589,00		
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.05.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		205.000.000,00		0,00		150.000.000,00		280.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	-	0,00	3	205.000.000,00	-	0,00	3	150.000.000,00	3	280.000.000,00		
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		205.000.000,00		0,00		150.000.000,00		280.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	-	0,00	3	205.000.000,00	-	0,00	3	150.000.000,00	3	280.000.000,00		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				505.000.000,00		595.000.000,00		610.000.000,00		635.000.000,00		653.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	505.000.000,00	1	595.000.000,00	1	610.000.000,00	1	635.000.000,00	1	653.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	60.000.000,00	2	75.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	70.000.000,00		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		83.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	5	3	60.000.000,00	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	83.000.000,00		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	360.000.000,00	2	380.000.000,00	2	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
105.01.107 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.500.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	-	60.000.000,00	2	130.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.500.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10		20		10		10		10			
105.01.107.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		60.500.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	-	0,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	60.500.000,00		
105.01.107.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10	60.000.000,00	20	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00		
105.01.108 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1246.000.000,00		1316.000.000,00		1316.000.000,00		1336.000.000,00		1336.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1246.000.000,00	1	1316.000.000,00	1	1316.000.000,00	1	1336.000.000,00	1	1336.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
105.01.108.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00		
105.01.108.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00		
105.01.108.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				720.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	720.000.000,00	1	740.000.000,00	1	740.000.000,00	1	760.000.000,00	1	760.000.000,00		
105.01.109 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000,00		690.000.000,00		700.000.000,00		715.000.000,00		738.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	700.000.000,00	21	690.000.000,00	21	700.000.000,00	21	715.000.000,00	21	738.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	69	69		80		80		80		80			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
105.01.109.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00		
105.01.109.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		113.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	69	69	100.000.000,00	80	90.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	113.000.000,00		
105.01.109.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	125.000.000,00		
105.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.134.645.419,00		2.140.951.898,00		2.238.131.806,00		2.338.235.921,00		2.410.973.151,00		
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	2.134.645.419,00	100	2.140.951.898,00	100	2.238.131.806,00	100	2.338.235.921,00	100	2.410.973.151,00	105.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	
105.03.101 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				100.000.000,00		86.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya penyampaian informasi dan edukasi kepada warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	24	40	100.000.000,00	40	86.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	115.000.000,00		
105.03.1010004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)				100.000.000,00		86.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	24	40	100.000.000,00	40	86.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	115.000.000,00		
105.03.102 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				906.000.000,00		859.951.898,00		902.131.806,00		968.735.921,00		992.973.151,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1	906.000.000,00	1	859.951.898,00	1	902.131.806,00	1	968.735.921,00	1	992.973.151,00		
	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	24	28		28		28		28		28			
	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	1.05.03.102.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				250.000.000,00		230.000.000,00		256.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1	1	250.000.000,00	1	230.000.000,00	1	256.000.000,00	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00		
1.05.03.102.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100	105.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
105.03.102.0025 - Penyusunan Rencana Kontinjensi				75.000.000,00		70.951.898,00		71.131.806,00		71.735.921,00		74.973.151,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	70.951.898,00	1	71.131.806,00	1	71.735.921,00	1	74.973.151,00		
105.03.102.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana				135.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		132.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	135.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	135.000.000,00		
105.03.102.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				115.000.000,00		101.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		123.000.000,00		
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	24	28	115.000.000,00	28	101.000.000,00	28	115.000.000,00	28	115.000.000,00	28	123.000.000,00		
105.03.102.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
105.03.102.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				55.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1	55.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
105.03.102.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	0	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00		
105.03.103 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				588.645.419,00		639.000.000,00		673.000.000,00		700.000.000,00		727.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T (04)	PAGU (05)	TARGE T (06)	PAGU (07)	TARGE T (08)	PAGU (09)	TARGE T (10)	PAGU (11)	TARGE T (12)	PAGU (13)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terpenuhinya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	900	588.645.419,00	900	639.000.000,00	900	673.000.000,00	900	700.000.000,00	900	727.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	21		21		21		21		21				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
105.03.103.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00			
105.03.103.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				310.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00			
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	900	310.000.000,00	900	360.000.000,00	900	380.000.000,00	900	400.000.000,00	900	420.000.000,00			
105.03.103.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				158.645.419,00		159.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		167.000.000,00			
Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	158.645.419,00	1	159.000.000,00	1	160.000.000,00	1	165.000.000,00	1	167.000.000,00			
105.03.103.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				60.000.000,00		60.000.000,00		73.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00			
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	73.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00			
105.03.104 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				540.000.000,00		556.000.000,00		563.000.000,00		569.500.000,00		576.000.000,00			
Terlaksananya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1	540.000.000,00	1	556.000.000,00	1	563.000.000,00	1	569.500.000,00	1	576.000.000,00			
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1		1				1		1				
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	25		25		25		25		25				
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
1.05.03.104.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi				85.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	82.000.000,00	1	84.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00			
1.05.03.104.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi				60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00		
1.05.03.1.04.0011- Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				85.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.500.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1	1	85.000.000,00	1	93.000.000,00	1	93.000.000,00	1	93.500.000,00	1	95.000.000,00		
1.05.03.1.04.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	25	80.000.000,00	25	85.000.000,00	25	90.000.000,00	25	95.000.000,00	25	95.000.000,00		
1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemantauan Sistem Informasi Kebencanaan				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00		
1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00		
1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor				85.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1	85.000.000,00	1	86.000.000,00		86.000.000,00	1	86.000.000,00	1	86.000.000,00		
105.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				325.295.200,00		356.825.316,00		373.021.968,00		389.705.987,00		401.828.858,00		
Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	-	100	325.295.200,00	100	356.825.316,00	100	373.021.968,00	100	389.705.987,00	100	401.828.858,00	105.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	
105.04.101- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				270.295.200,00		296.425.316,00		308.021.968,00		317.705.987,00		326.828.858,00		
Terlaksananya Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)		1	270.295.200,00	1	296.425.316,00	1	308.021.968,00	1	317.705.987,00	1	326.828.858,00		
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	-	45		60		60		60		60			
105.04.1010004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				80.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		71.300.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)		1	80.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	71.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
105.04.1010018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0,00		61000.000,00		60.000.000,00		61000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1	0,00	1	61000.000,00	1	60.000.000,00	1	61000.000,00	1	65.000.000,00		
105.04.1010021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				65.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		58.600.000,00		62.188.858,00		
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)		1	65.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	58.600.000,00	1	62.188.858,00		
105.04.1010027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				68.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		45	68.000.000,00	60	60.000.000,00	60	60.000.000,00	60	65.000.000,00	60	65.000.000,00		
105.04.1010030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				57.295.200,00		55.425.316,00		63.021.968,00		63.105.987,00		63.340.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	57.295.200,00	1	55.425.316,00	1	63.021.968,00	1	63.105.987,00	1	63.340.000,00		
105.04.102 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				55.000.000,00		60.400.000,00		65.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Pembinaan/penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)		1	55.000.000,00	1	60.400.000,00	1	65.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00		
105.04.102.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				55.000.000,00		60.400.000,00		65.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)		1	55.000.000,00	1	60.400.000,00	1	65.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Riau mantap
			1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	ARG, <i>Green For Riau</i>
			1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Riau mantap
			1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi	Riau mantap
			1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	Riau mantap, <i>Green For Riau</i>
			1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Riau mantap
			1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	ARG dan RAD Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <i>Green For Riau</i>
			1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Riau mantap
			1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	ARG dan PPKE
			1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Riau mantap, <i>Green For Riau</i>
			1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Riau mantap
			1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Riau mantap
			1.05.03.1.04.0011 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Riau mantap, <i>Green For Riau</i>
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Riau mantap
			1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Riau mantap
			1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Riau mantap
			1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Riau mantap
			1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Riau mantap, <i>Green For Riau</i>

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kebijakan umum dan program Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan umum disusun untuk pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Strategi yang dibuat perlu didukung dengan kebijakan umum, sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan program-program dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang terangkum dalam rencana strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan agar pencapaian target dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau untuk tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu “Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana”. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK Provinsi Riau) Tahun 2025-2029, dapat diuraikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 (T-C.28)
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN									
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	
3.	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	87,5	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,75	66,78	66,80	66,82	66,85	66,87	66,90	
5.	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	-	100	100	100	100	100	100	

Adapun formulasi yang digunakan dalam perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai berikut:

$$\text{IKD} = \text{Jumlah (Indeks Prioritas} \times \text{ bobot tiap prioritas)}$$

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci BPBDPK Provinsi Riau
Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	positif	%	87,5	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan penanggulangan bencana daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Renstra ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja BPBDPK Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan dan isu-isu strategis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance* di Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

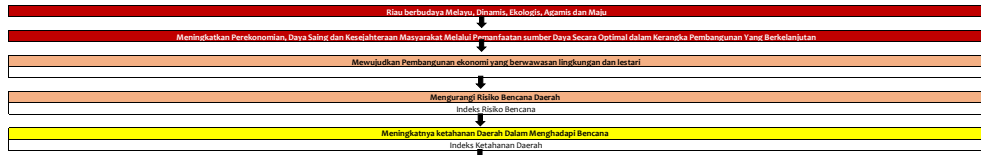
**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

Lampiran 1. Cascading Perangkat Daerah

11/01/2024



Intermediate
Jika terdapat 2 sasaran RPJMD, Tujuan PD terpat 1

Intermediate Outcome 1 (SASAKY)

Midlevel outcome 1 - sasaran

Intermediate Outcome 2 (SOPICAKS)

Midlevel outcome program (Intermediate Outcome)

Program

Output

Indikator Kegiatan

Kegiatan

Sub kegiatan



PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD (diisi oleh PD)
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Yang Terdapat Dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Penanggulangan Bencana 	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tidak terkait secara langsung dengan Proyek Strategis Nasional

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. BPBDPK Provinsi Riau

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANG KAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Indeks Risiko Bencana	137,52	137,40	BNPB	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.57	0.61	BPBDPK Provinsi Riau

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Dinas Sosial 2. BPBDPK

TAGGING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG Mendukung PROGRAM GREEN FOR RIAU 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)
Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Agamis dan Maju						
- Mengurangi Risiko Bencana Daerah						
	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
				Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	105.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Kegiatan - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Sub Kegiatan - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
					Kegiatan - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Sub Kegiatan - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
					Sub Kegiatan - Pengelolaan Risiko Bencana	
					Sub Kegiatan - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
					Kegiatan - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Sub Kegiatan - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
					Kegiatan - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Sub Kegiatan - Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
			Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	105.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Kegiatan - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Kegiatan - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Sub Kegiatan - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN												
- Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	100	100	100	100	100	100	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	66,75	66,78	66,80	66,82	66,85	66,87	66,90		

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.117.785.201,00		17.878.978.727,00		18.411.249.824,00		18.956.637.219,00		19.438.908.598,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.657.844.582,00		15.381.201.513,00		15.800.096.050,00		16.228.695.311,00		16.626.106.589,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	14.657.844.582,00	100	15.381.201.513,00	100	15.800.096.050,00	100	16.228.695.311,00	100	16.626.106.589,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.134.645.419,00		2.140.951.898,00		2.238.131.806,00		2.338.235.921,00		2.410.973.151,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	100	2.134.645.419,00	100	2.140.951.898,00	100	2.238.131.806,00	100	2.338.235.921,00	100	2.410.973.151,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					325.295.200,00		356.825.316,00		373.021.968,00		389.705.987,00		401.828.858,00	
Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	0	100	100	325.295.200,00	100	356.825.316,00	100	373.021.968,00	100	389.705.987,00	100	401.828.858,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					17117785201.00		17878978727.00		18411249824.00		18956637219.00		19438908598.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN							
- Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)		
					Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Tertindakannya penyampaian informasi dan edukasi kepada warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
				Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontinjensi	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
				Terpenuhinya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1.05.03.1.04.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1.05.03.1.04.0011 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.1.04.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	
			Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.117.785.201,00		17.878.978.727,00		18.411.249.824,00		18.956.637.219,00		19.438.908.598,00			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.657.844.582,00		15.381.201.513,00		15.800.096.050,00		16.228.695.311,00		16.626.106.589,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	14.657.844.582,00	100	15.381.201.513,00	100	15.800.096.050,00	100	16.228.695.311,00	100	16.626.106.589,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	5	30.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2		2		2		2						
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		RIAU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00			
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.036.844.582,00		12.325.201.513,00		12.919.096.050,00		13.132.695.311,00		13.358.606.589,00			
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	77	87	87	12.036.844.582,00	90	12.325.201.513,00	90	12.919.096.050,00	90	13.132.695.311,00	90	13.358.606.589,00			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.036.844.582,00		12.325.201.513,00		12.919.096.050,00		13.132.695.311,00		13.358.606.589,00		RIAU	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	77	87	87	12.036.844.582,00	90	12.325.201.513,00	90	12.919.096.050,00	90	13.132.695.311,00	90	13.358.606.589,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	60.000.000,00	2	75.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					60.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	70.000.000,00			
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		83.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	3	3	60.000.000,00	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	83.000.000,00			
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	360.000.000,00	2	380.000.000,00	2	400.000.000,00			
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.500.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	2	-	60.000.000,00	2	130.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.500.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	12	10		20		10		10		10				
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		60.500.000,00		RIAU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	2	-	0,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	60.500.000,00			
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	12	10	60.000.000,00	20	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00			
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.246.000.000,00		1.316.000.000,00		1.316.000.000,00		1.336.000.000,00		1.336.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	30	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00	21	500.000.000,00			
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		113.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	69	69	69	100.000.000,00	80	90.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	113.000.000,00			
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	125.000.000,00			
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.134.645.419,00		2.140.951.898,00		2.238.131.806,00		2.338.235.921,00		2.410.973.151,00			
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	87,5	100	100	2.134.645.419,00	100	2.140.951.898,00	100	2.238.131.806,00	100	2.338.235.921,00	100	2.410.973.151,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					100.000.000,00		86.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00			
Terlaksananya penyampaian informasi dan edukasi kepada warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	24	100	40	100.000.000,00	40	86.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	115.000.000,00			
1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)					100.000.000,00		86.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	24	100	40	100.000.000,00	40	86.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	115.000.000,00			
1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					906.000.000,00		859.951.898,00		902.131.806,00		968.735.921,00		992.973.151,00			
Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1	1	1	906.000.000,00	1	859.951.898,00	1	902.131.806,00	1	968.735.921,00	1	992.973.151,00			
	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	0	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	24	28	28		28		28		28		28				
1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana					250.000.000,00		230.000.000,00		256.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1	1	1	250.000.000,00	1	230.000.000,00	1	256.000.000,00	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00			
1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100	100	105.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi					75.000.000,00		70.951.898,00		71.131.806,00		71.735.921,00		74.973.151,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	0	1	1	75.000.000,00	1	70.951.898,00	1	71.131.806,00	1	71.735.921,00	1	74.973.151,00			
1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana					135.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		132.000.000,00		135.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	1	135.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	135.000.000,00			
1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana					115.000.000,00		101.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		123.000.000,00		RIAU	
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	24	28	28	115.000.000,00	28	101.000.000,00	28	115.000.000,00	28	115.000.000,00	28	123.000.000,00			
1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		RIAU	
Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		RIAU	
Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. KAMPAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	0	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00			
1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					588.645.419,00		639.000.000,00		673.000.000,00		700.000.000,00		727.000.000,00			
Terpenuhinya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	1	588.645.419,00	1	639.000.000,00	1	673.000.000,00	1	700.000.000,00	1	727.000.000,00			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	1.000	900		900		900		900						
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	21	21		21		21		21						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	1		1		1		1						
1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		RIAU	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	21	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00	21	60.000.000,00			
1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					310.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		RIAU	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	1.000	900	310.000.000,00	900	360.000.000,00	900	380.000.000,00	900	400.000.000,00	900	420.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana					158.645.419,00		159.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		167.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	1	158.645.419,00	1	159.000.000,00	1	160.000.000,00	1	165.000.000,00	1	167.000.000,00			
1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					60.000.000,00		60.000.000,00		73.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	73.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00			
1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					540.000.000,00		556.000.000,00		563.000.000,00		569.500.000,00		576.000.000,00			
Terlaksananya Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1	1	540.000.000,00	1	556.000.000,00		563.000.000,00	1	569.500.000,00	1	576.000.000,00			
	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	25	25		25		25		25		25				
	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	2	5		5		5		5		5				
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi					85.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	85.000.000,00	1	82.000.000,00	1	84.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00			
1.05.03.1.04.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi					60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00			
1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	12	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00			
1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor					85.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1	1	85.000.000,00	1	86.000.000,00		86.000.000,00	1	86.000.000,00	1	86.000.000,00			
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					325.295.200,00		356.825.316,00		373.021.968,00		389.705.987,00		401.828.858,00			
Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	-	100	100	325.295.200,00	100	356.825.316,00	100	373.021.968,00	100	389.705.987,00	100	401.828.858,00	1.05.0.00.0.00.02.00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					270.295.200,00		296.425.316,00		308.021.968,00		317.705.987,00		326.828.858,00			
Terlaksananya Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			-	270.295.200,00	1	296.425.316,00	1	308.021.968,00	1	317.705.987,00	1	326.828.858,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	-	-	45		60		60		60		60				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)			1		1		1		1		1				
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					80.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		71.300.000,00		RIAU	
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)			1	80.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	71.300.000,00			
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					0,00		61.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		65.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			-	0,00	1	61.000.000,00	1	60.000.000,00	1	61.000.000,00	1	65.000.000,00			
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					65.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		58.600.000,00		62.188.858,00		RIAU	
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)			1	65.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	58.600.000,00	1	62.188.858,00			
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					68.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)			45	68.000.000,00	60	60.000.000,00	60	60.000.000,00	60	65.000.000,00	60	65.000.000,00			
1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					57.295.200,00		55.425.316,00		63.021.968,00		63.105.987,00		63.340.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)			1	57.295.200,00	1	55.425.316,00	1	63.021.968,00	1	63.105.987,00	1	63.340.000,00			
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					55.000.000,00		60.400.000,00		65.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00			
Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)			1	55.000.000,00	1	60.400.000,00	1	65.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					55.000.000,00		60.400.000,00		65.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)			1	55.000.000,00	1	60.400.000,00	1	65.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00			

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
			1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi	
			1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	
			1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
			1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
			1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
			1.05.03.1.04.0011 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
			2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				
1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				

METADATA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU

Jenis Indikator	: Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Nama Indikator	: Indeks Ketahanan Daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU))
Institusi Penghasil	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Definisi	: Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administratif. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau secara umum berasal dari 7 (tujuh) indeks prioritas dengan bobot masing-masing sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (6%);2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (6%);3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik (7,5%);4. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik (10,5%);5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan (14%)
Interpretasi	: Menunjukkan nilai dengan meningkatnya ketahanan daerah (IKD) akan menjadikan turunnya nilai indeks risiko bencana daerah (IRB)
Metode/Rumus Perhitungan	: IKD = JUMLAH (INDEKS PRIORITAS x BOBOT TIAP PRIORITAS)
Ukuran/Satuan	: poin
Judul	: Badan Pusat Statistik
Publikasi/Sumber Data	
Tahun Data Tersedia	: 2023-2024
Level Estimasi	: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan	: Satu Tahun
Apakah Indikator dapat diakses Umum	: Ya

Jenis Indikator : **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

2. Nama Indikator : **Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)**

Institusi Penghasil : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Definisi : Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Metode/RumusPerhitungan :
$$= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penanggulangan bencana pada Tahun } n}{\text{Jumlah total penyelenggaraan penanggulangan bencana}} \times 100 \%$$

Ukuran/Satuan : Persen

Judul : Laporan Kinerja Instansi

Publikasi/Sumber Data : Pemerintah (LKJIP), dan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah

Tahun Data Tersedia : Umumnya tersedia setiap tahun

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi : Tahunan

Pengumpulan

Apakah Indikator Umum : Belum Tersedia untuk Umum dapat diakses Umum

3. Nama Indikator : **Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)**

Institusi Penghasil : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Definisi : Persentase tingkat penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Metode/RumusPerhitungan :
$$= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada Tahun } n}{\text{Jumlah total penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran}} \times 100 \%$$

Ukuran/Satuan : Persen

Judul : Laporan Kinerja Instansi

Publikasi/Sumber Data : Pemerintah (LKJIP), dan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah

Tahun Data : Umumnya tersedia setiap tahun
 Tersedia : tahun
 Level Estimasi : Provinsi
 Frekuensi : Tahunan
 Pengumpulan :
 Apakah Indikator : Belum Tersedia untuk Umum dapat diakses
 Umum

3. Nama Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Institusi Penghasil : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Definisi : Persentase tingkat penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau

Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021, penilaian dilakukan pada sub komponen evaluasi AKIP dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot Nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-

	25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Metode/RumusPerhitungan : Penilaian SAKIP berdasarkan elemen: perencanaan kinerja, pengukuran indikator, pelopran kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran. Skor akhir dihitung melalui kombinasi bobot dari masing-masing unsur tersebut dan pemetaan predikat.

$$\text{Nilai SAKIP} = n_1P + n_2M + n_3L + n_4E + n_5C$$

Dimana : P = Skor perencanaan

M= Skor pengukuran

L = Skor Pelaporan

E = Skor evaluasi internal

C = Skor capaian sasaran

n_i = bobot masing-masing unsur

Setelah dihitung, nilai dikonversi ke skala huruf atau predikat

Untuk penyimpulan nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan nilai gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja, dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/subkoordinator
BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan

	anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai >30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Ukuran/Satuan : Skala Huruf atau Predikat
Judul : Laporan Kinerja Instansi
Publikasi/Sumber : Pemerintah (LKJIP), e-
Data : SAKIP dan Dokumen
Evaluasi Internal Daerah
Tahun Data : Umumnya tersedia setiap
Tersedia : tahun
Level Estimasi : Perangkat Daerah di Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi : Tahunan
Pengumpulan :
Apakah Indikator : Belum Tersedia untuk Umum
dapat diakses
Umum



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,

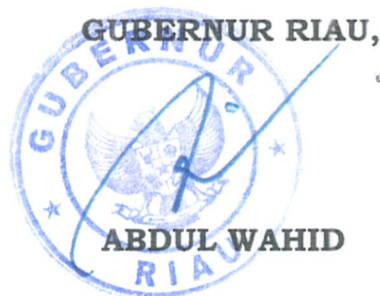
- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

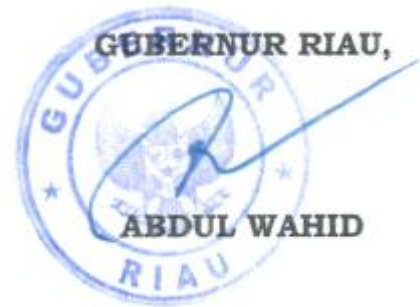
NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah





KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
Nomor : 01 /KPTS/BPBD/I/2024

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN REAKSI CEPAT (SRC) PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Penanggulangan Bencana khususnya Kebakaran Hutan dan Lahan pada DPA BPBD Provinsi Riau Tahun 2024 perlu dibentuk Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 65).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Riau sebagaimana diktum pertama bertugas :
1. Mencari dan menerima laporan kejadian Bencana di Provinsi Riau Tahun 2024,
 2. Melakukan Kaji Cepat dari Data Laporan Kejadian Bencana mengenai Kekuatan Personil dan Kebutuhan Peralatan dan Logistik dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2024,
 3. Melaksanakan Upaya Penanggulangan Bencana Khususnya Operasi Pemadaman Darat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2024,
 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2024,
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2024 dan APBN Tahun 2024 dan Sumber Dana Lainnya;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, M.H
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19730421 199203 1 002

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN SATUAN REAKSI CEPAT (SRC) PENANGGULANGAN BENCANA BPBD
PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SRC
1.	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	ABRI ARIANTO S, ST, MT	Sekretaris BPBD Provinsi Riau	Wakil Penanggung Jawab
3.	JIM GAFUR, AP, Msi	Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau	Ketua
4.	ABDUL RAZAK, SH, M.IP	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Riau	Wakil Ketua
5.	H. SUARFIANTO, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Riau	Sekretaris
6.	ADE KURNIAWAN, SKM	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama BPBD Provinsi Riau	Anggota
7.	MULIANIS, SH	Analisis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Riau	Anggota
8.	BETHA KRISTINA, SS	Analisis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Riau	Anggota
9.	MUHAMMAD NUR S, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran BPBD Provinsi Riau	Anggota
10.	WAN SYAHRIZAL, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran BPBD Provinsi Riau	Anggota
11.	SELAMAT, S.A.P	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Riau	Anggota
12.	JEFRI JS, Amd	Pengelola Dokumentasi BPBD Provinsi Riau	Anggota
13.	ZULKARNAINI, SE	Penyusun Pemberian Bantuan Teknis BPBD Provinsi Riau	Anggota

14.	SUHARYANTO, SE	Bendahara Pengeluaran BPBD Provinsi Riau	Anggota
15.	ALMUBIN, SE	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Riau	Anggota
16.	MUSTAFA KAMAL, SE	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Riau	Anggota
17.	FEBRY YANTO	Pengaministrasian Kepegawaian BPBD Provinsi Riau	Anggota
18.	ZULFAHMI, SE	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Riau	Anggota
19.	INDRA GUNAWAN, S. Sos	Analisis Bencana BPBD Provinsi Riau	Anggota
20.	T. MASRIL, S.Sos	Analisis Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Riau	Anggota
21.	ASNI PATRIOK TOMINAR, AMK	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan BPBD Provinsi Riau	Anggota
22.	HASAN NURDIN	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
23.	RAMADAN	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
24.	M. HADI ERIANTO, ST	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
25.	RAIS MAHENDRA	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
26.	CORNELLIUS SANJAYA	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
27.	YULI SARDI	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
28.	KRISTIANTO	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
29.	M.R. AGUSTIARAHMAN	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota

30.	REZA LIA REFFINO	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
31.	ILHAM SUDDERAJAD	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota
32.	T. ERFI SATRIA	THL BPBD Provinsi Riau	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, M.H
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19730421 199203 1 002

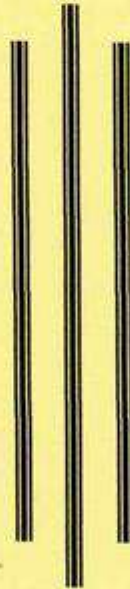


**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**



**NOMOR : 323/LHR/INSP-RIAU/lr.II/X/2025
TANGGAL : 13 OKTOBER 2025**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : 323/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Riau Tahun 2025-2029

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Riau
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan

Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil revidu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil revidu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil revidu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yang merupakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi Kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

- guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan
 4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran Provinsi Riau.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - .4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan capaian Data Statistik Sektorial Daerah tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Bstrategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

G INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU, *AR*



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029



**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	Disusun Oleh/Tanggal	Junaidi
	Direviu Oleh/Tanggal	FITH ERMANTO
	Direviu Oleh/Tanggal	RONI COKRO SUBAGIO

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Riau Nomor (selaras SPT) 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATAUMUM

Tujuan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN :

Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

Sasaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **44** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **6** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

C. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

E. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **23** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.



Tanggal 6 Oktober 2025
Supervisor/Pengendali Teknis

RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si
NIP 196712051998031003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAMPIRAN

KERTAS KERJA REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029



**KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
DAN/ATAU PERTUMBUHAN KINERJA URUSAN DAERAH
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PD
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Meningkatnya ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.011.01	1.05.011.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi
2					1.05.011.01	1.05.011.01.0007	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Selaras		Catatan	Rekomendasi
3					1.05.011.02	1.05.011.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Selaras		Catatan	Rekomendasi
4					1.05.011.03	1.05.011.03.0002	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
5					1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6					1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7						1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8						1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9						1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10						1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
11						1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -
12					1.05.01.1.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
13					1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14						1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
15						1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
16				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -	
17						1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
18						1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
19		Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	- Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi,	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
28						1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
29					1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
30						1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31						1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
32					1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
33						1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
28						1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
29					1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
30						1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31						1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
32					1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
33						1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
							meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal					
34						1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan	Selaras		Catatan	Rekomendasi
35						1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan	Orang	Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI	
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS			
36							Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)						
						1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi
						1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	kabupaten/kota	Selaras		Catatan	Rekomendasi
37						1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi
38													
39			- Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi	

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
			non kebakaran Kabupaten/Kota	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					
40						1.05.04.1.01.0018 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi
41						1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan	Selaras		Catatan	Rekomendasi
42						1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	Selaras		Catatan	Rekomendasi
43						1.05.04.1.01.0030 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Selaras		Catatan	Rekomendasi
44					1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan,	1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan,	Laporan	Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
					Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					



**KETERHUBUNGAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DALAM
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN YANG DIAMPU:

- 1.
- 2.
- 3.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
5	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMD
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		Tidak Selaras	Catatan -Program ini tidak menjadi urusan BPBD&PK	Rekomendasi -Agar BPBD&PK menyesuaikan dengan urusannya
2	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMD
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

URUSAN YANG DIAMPU:

- 1
- 2
- 3

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	-	-		Tidak Selaras	Catatan -Program ini bukan merupakan Urusan BPBD&PK	Rekomendasi -AgarOPD BPBD&PK menyesuaikan dengan Urusannya

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIUAPIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
3	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Prioritas)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE
SEBELUMNYA
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 -2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0- T5						HASILREVIU				
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA(%)	BASELINE	TARGET					CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI	
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS			TIDAK SELARAS
1	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	100	100	87.5	87.5%	87.5	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan	Rekomendasi
2	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pon	66.45	66.45	66.75	100.4%	66.75	66.78	66.80	66.82	66.85	66.87	66.90	Selaras		Catatan	Rekomendasi
3	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	N/A	N/A	N/A	NaN%		100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan	Rekomendasi
4	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.57	0.58	0.57	98%	0.57	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	Selaras		Catatan	Rekomendasi



**KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE
SEBELUMNYA
PROVINSI RIAU
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH: 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	KD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU				
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI	
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS			TIDAK SELARAS
1	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	-	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan	Rekomendasi
2	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%	100	100	87.5	87.5%	87.5	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan	Rekomendasi



**KESESUAIAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2020 - 52029
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 - 52029**

Perangkat Daerah: 1.05.0.00.0.00.02.00000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bidang Urusan:

- 1.
- 2.
- 3.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU								
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMADSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	2	1	1	1	1	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana						Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
2							2	1	1	1	1	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana									

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				HASIL REVIU						
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUBKEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS			
																			disajikan pada DSSD			
3			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD		
4				Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1		Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun		0	0			Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
5				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan	Lembaga	2	2	5	5	5	5		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi		0	0			Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAP										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				HASILREVIU					
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMADSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
6					dunia usaha yang telah terdaftar dan legal																
				Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi		0	0				Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD
7				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	50	25	25	25	25	25	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi		0	12			Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
8		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan		1	1	1	1		Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		0	0			Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				HASILREVIU													
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUBKEGIATAN						NAMADSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI								
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS										
																			disajikan pada DSSD										
9				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga, dan Kermitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen		1	1				1	1					Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	0					Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
10																			Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	0					Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
11																			Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	2					Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
12																			Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah	Dokumen	0	0					Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				HASILREVIU						
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS			
20																			disajikan pada DSSD			
																			Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD		
21			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan		1	1	1	1	1							Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
22																			Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data Capaian tahun 2024 belum disajikan pada DSSD	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada DSSD
23																			Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penyelamatan	Tidak Selaras	Catatan Satuan dan Data	Rekomendasi Agar menyajikan satuan dan data

**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
1	BAB I PENDAHULUAN				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		<input checked="" type="checkbox"/>	Agar pencantuman dasar hukum diurutkan/disesuaikan berdasarkan hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan dan tahun terbit. Contoh pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (no. 7) seharusnya tidak berada pada urutan di atas Peraturan Pemerintah tahun 2008 (no. 8 dan no. 9)
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.		<input checked="" type="checkbox"/>	Pada beberapa narasi, masih menggunakan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (agar disesuaikan menjadi BPBDBK)
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<p>Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.</p> <p>Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh data yang disajikan, baik dalam narasi, tabel dan/atau gambar, agar dilengkapi/disebutkan sumber dan tahunnya (misalnya: Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029). - Agar menyajikan data sarana prasarana pendukung inklusi dan gender. - Sudah terdapat penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD 5 tahun terakhir (tabel 2.8 dan 2.9) namun belum termuat secara eksplisit keterkaitannya dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada narasi. Aar ditambahkan.
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sumber daya Perangkat Daerah		<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Kelompok sasaran layanan		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)			<input checked="" type="checkbox"/>	Pada Sub Bab 2.1.5 Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, juga menyebutkan Kerjasama dengan Perusahaan dan ormas di Provinsi Riau. Mohon penjelasan, jika merupakan bagian Kerjasama Daerah, agar disajikan di Sub Bab 2.1.7
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)			<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dibuat Sub Bab 2.1.7 Kerjasama Daerah. Jika terdapat Kerjasama, agar dijelaskan dengan rinci bentuk kerjasama yang ada dan sudah berlangsung berapa lama, serta pihak swasta mana saja yang dimaksud). - Jika tidak ada, agar diberikan narasi penjelasan (seperti yang disajikan pada Sub Bab 2.1.6)

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkauan aspirasi yang dilakukan oleh PD.		<input checked="" type="checkbox"/>	- Dalam perumusan isu strategis Perangkat Daerah, agar memperhatikan data yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 Bab II Sub Bab 2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dimana pada pembahasan bencana berkaitan dengan faktor perubahan iklim. Salah satu upaya mitigasi yang dapat mengurangi perubahan iklim adalah penanganan kebakaran hutan.
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan: a. Kalimat kondisi; b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . (<i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif Perangkat Daerah memperhatikan: 1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. 2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. <i>(dengan menggunakan nomenklatur Terlaksananya, Terepenuhinya, Tersedianya, dst..)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian Sub Kegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif		<input checked="" type="checkbox"/>	Agar dicek kembali Tabel 4.2 yang diunduh dari SIPD. Pada hal 91, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					Kebakaran, baris Kegiatan 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran tidak ada
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir point 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</p> <p>- <i>(Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</i></p> <p>- <i>Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengunduh Tabel 4.4 pada Sistem SIPD Renstra dan menyajikan pada Dokumen Renstra - Telah memberi keterangan (Anggaran Responsif) Gender ARG - Agar memberi keterangan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Penyandang Disabilitas pada 2 Sub Kegiatan terkait (pada sub kegiatan tersebut justru diberi keterangan ARG (Tabel 4.3 hal 93)) - Agar menambahkan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 Bab III, BPBDPK mendukung program prioritas Pembangunan Daerah yang mana (pada hal III-48, sasaran Mengurangi Risiko Bencana Daerah dilaksanakan melalui program strategis Riau Mantap) dan selanjutnya agar diisikan program prioritas


NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					tersebut pada kolom keterangan di Tabel 4.3.
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5) <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah di-tagging Indikator Tujuan dan Sasaran PD - Agar mengunduh Tabel 4.5 pada Sistem SIPD Renstra dan menyajikan pada Dokumen Renstra (nomor Tabel dapat diurutkan kembali) - Yang disajikan pada Dokumen Renstra Tabel 4.4 hal 94 belum menyajikan Target Tahun 2030)
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator Kinerja Kunci Tabel 4.6) <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar mengunduh Tabel 4.6 pada Sistem SIPD Renstra dan menyajikan pada Dokumen Renstra (nomor Tabel dapat diurutkan kembali) - Yang disajikan pada Dokumen Renstra Tabel 4.5 hal 95 adalah Tabel 4.5 pada Sistem SIPD Renstra
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	(dapat diunduh di SIPD Renstra - Dashboard - Bagan)			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
5	BAB V PENUTUP				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	<input checked="" type="checkbox"/>		
	LAMPIRAN				Agar dapat melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Cascading hasil input SIPD - Form Penyelarasan Renstra dengan RPJMN 2025-2029 (perbaiki/lengkapi data yang belum diisi) - Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil input SIPD yang Update - Metadata pembentuk IKU dan IKK (perbaiki/tambahkan metada pembentuk IKK)
	CATATAN PENTING				<ul style="list-style-type: none"> - Agar menindaklanjuti reuiu APIP terhadap Rankhir Renstra PD - Agar membuat tagging program/kegiatan/subkegiatan dalam mendukung pelaksanaan <i>Green for Riau</i>

Pekanbaru, 24 Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN | PAIDI. S.Hut., MT
NIP. 19720428 199503 1 001 |
| 2. | KATIM TATA RUANG, PERTANAHAN,
BENCANA DAN KEBAKARAN /
PERENCANA AHLI MUDA | MEISYE YULIANTY, ST, MT
NIP. 19821013 200604 2 007 |
| 3. | SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA | KHAIRUL FAJRI, ST, M.Eng
NIP. 19830923 201001 1 012 |
| 4. | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | BAIQ RIZKY FATMASARI, S.STP, M.PAR,
MInterSustTourMnt
NIP. 19950320 201708 2 001 |



.....
.....
.....
.....